

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TAHUN 2018



JAKARTA 2019

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategis di tingkat itu, sebagai pertanggungjawaban atas terwujudnya hasil-hasil (*outcome*) pemerintahan dan pembangunan baik dari sisi keuangan maupun akuntabilitas instansi.

Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana setiap unit Eselon I sampai dengan Eselon IV maupun satuan kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggungjawaban atas terwujudnya hasil-hasil (*outcome*) pemerintahan dan pembangunan baik dari sisi keuangan maupun akuntabilitas instansi.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 ini disusun dengan maksud sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas dalam Tahun 2018 yang berisi gambaran serta penilaian secara menyeluruh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Diharapkan dengan telah disusunnya Laporan ini, akan bermanfaat dan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) bagi pimpinan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

Jakarta,

2019

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



ARIEF TOHA

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670320 199203 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	I – 1
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	I – 4
1.3 Sumber Daya Manusia	I – 9
1.4 Sistematika Laporan	I – 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2018	II – 1
2.1 Perencanaan Strategis	II – 1
2.2 Perjanjian Kinerja	II – 1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2018	III – 1
3.1 Capaian Kinerja	III – 1
3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	III – 3
3.3 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018	III – 10
3.4 Analisa Efisiensi Pembangunan Sumber Daya	III – 59
BAB IV PENUTUP	IV – 1
4.1 Kesimpulan	IV – 1
4.2 Langkah Kedepan	IV – 2

DAFTAR TABEL

1.3.1	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan	I – 10
1.3.2	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan	I – 10
2.2.1	Perjanjian Kinerja tahun 2018 (Awal)	II – 2
2.2.2	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (Terakhir)	II – 7
3.3.1	Pencapaian Kinerja Setditjeb Hubla Tahun 2018	III – 3
3.3.2	Prosentase Peningkatan Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang bersertifikat	III – 10
3.3.3	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)	III – 11
3.3.4	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)	III – 11
3.3.5	Persentase Keandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III – 14
3.3.6	Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Skala Likert 1-5)	III – 15
3.3.7	Tabel Skala Likert.....	III – 16
3.3.8	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	III – 17
3.3.9	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	III – 18
3.3.10	Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen Hubla.....	III – 18
3.3.11	Jumlah Dokumen dan Laporan yang Disusun Terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya	III – 20
3.3.12	Jumlah Pembinaan, Sosialisasi, dan Koordinasi Terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya	III – 21
3.3.13	Jumlah Studi dan Kajian yang Disusun.....	III – 22
3.3.14	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Hubla yang Disusun.....	III –23
3.3.15	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi di Bidang Keuangan.....	III – 24

3.3.16	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keuangan	III – 25
3.3.17	Jumlah Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi.....	III – 27
3.3.18	Jumlah penerbitan SK Mutasi/Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional	III – 28
3.3.19	Prosentase Jumlah Kasus Disiplin Pegawai yang Dapat Ditangani Sampai Selesai.....	III – 29
3.3.20	Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan.....	III – 30
3.3.21	Jumlah Peraturan Perundangan yang Telah Disosialisasikan	III – 32
3.3.22	Jumlah Penyelesaian Perkara.....	III – 34
3.3.23	Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri.....	III – 36
3.3.24	Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral.....	III – 37
3.3.25	Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama Nasional dan Internasional.....	III – 39
3.3.26	Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran.....	III – 41
3.3.27	Persentase Pelaksanaan Administrasi dan Operasional Kerumahtanggaan.....	III – 42
3.3.28	Nilai BMN pada Neraca Ditjen Perhubungan Laut.....	III – 43
3.3.29	Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat	III – 44
3.3.30	Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokole	III – 45
3.3.31	Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pemeliharaan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi.....	III – 46
3.3.32	Jumlah Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Terkait RB.....	III – 48
3.3.33	Jumlah Dokumen RB yang Disusun	III – 49
3.3.34	Jumlah SDM Setditjen yang Mengikuti Diklat/Bimtek	III – 50

3.3.35	Jumlah Sistem dan Informasi di Lingkungan Setditjen Hubla.....	III – 51
--------	--	----------

DAFTAR GRAFIK

3.3.1	Prosentase Peningkatan Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang Bersertifikat.....	III – 11
3.3.2	Persentase Keandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III – 14
3.3.3	Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (skala likert 1-5).....	III – 15
3.3.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	III – 18
3.3.5	Prosentase Penyerapan Anggaran	III – 19
3.3.6	Jumlah Dokumen SAKIP dan dokumen lainnya	III – 21
3.3.7	Prosentase Penyerapan Anggaran	III – 22
3.3.8	Jumlah Studi dan Kajian yang Disusun	III – 23
3.3.9	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Hubla yang Disusun	III – 24
3.3.10	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi di Bidang Keuangan	III – 25
3.3.11	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keuangan	III – 26
3.3.12	Jumlah Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Terkait Peningkatan Kompetensi	III – 28
3.3.13	Jumlah Penerbitan SK Mutasi/Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional	III – 29
3.3.14	Prosentase Jumlah Kasus Disiplin Pegawai yang Dapat Ditangani Sampai Selesai	III – 30
3.3.15	Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan yang Ditetapkan).....	III – 31
3.3.16	Jumlah Peraturan Perundangan yang Telah Disosialisasikan.....	III – 33
3.3.17	Jumlah Penyelesaian Perkara	III – 35
3.3.18	Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri.....	III – 37

3.3.18	Jumlah Perjanjian Kerjasama Bilateral,Regional dan Multilateral.....	III – 38
3.3.19	Jumlah Rancangan dan Peraturan yang Ditetapkan	III – 38
3.3.20	Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama Nasional dan Internasional.....	III – 40
3.3.21	Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran	III – 42
3.3.22	Persentase Pelaksanaan Administrasi dan Operasional Kerumahtanggaan	III – 43
3.3.23	Nilai BMN Pada Neraca Ditjen Perhubungan Laut.....	III – 44
3.3.24	Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat.....	III – 45
3.3.25	Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokoler.....	III – 46
3.3.26	Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pengembang Pemeliharaan Informasi yang Berbasis Teknologi Informas	III – 47
3.3.27	Jumlah Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Terkait RB	III – 49
3.3.28	Jumlah Dokumen RB yang Disusun	III – 50
3.3.29	Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran	III – 51
3.3.30	Jumlah Sistem dan Informasidi Lingkungan Setditjen Hubla	III – 52
3.3.31	Persepsi Publik Terkait Pelayanan Informasi di Setditjen Hubla.....	III – 53
3.3.32	Jumlah Dokumen SAKIP yang Disusun	III – 54
3.3.33	Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen Hubla	III – 55
3.3.34	. Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Hubla.....	III – 56
3.3.35	Nilai BMN Setditjen Hubla	III – 50
3.3.36	Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran	III – 57
3.3.37	Target PNPB Setditjen Hubla.....	III – 58



BAB I

PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2018

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang yang lebih difokuskan pada keuangan, hal itu menunjukkan bahwa banyak kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang pertanggungjawaban keuangannya diterima tanpa syarat. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat pada umumnya, baik dilihat dari hasil maupun dampak dari kegiatan tersebut dapat menyadari kekeliruan dimasa yang lalu dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana setiap unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan/kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada dasarnya mencoba mengkomunikasikan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya strategik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran strategiknya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi organisasi serta tujuan strategik organisasi telah diformalkan di dalam suatu Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam Rencana Strategis ditetapkan sejumlah Sasaran Strategis. Pemenuhan atas sasaran strategik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan strategik

organisasi di akhir tahun kelima. Apabila tujuan strategik organisasi telah dipenuhi maka organisasi tersebut dapat dipersiapkan telah memenuhi visi dan misinya.

Dasar Hukum Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025,
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah,
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara,
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan,
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
12. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah,
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/ 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan instansi Pemerintah,
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

- PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013,
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan,
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PM No. 86 Tahun 2016,
 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
 23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019.
 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.873 Tahun 2017 Tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PM No. 86 tahun 2016, struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(KM. 189 TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PM No. 86 tahun 2016)



TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SETDITJEN HUBLA

a. Tugas Pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM 56 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan PM 122 Tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b. Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran.
2. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian, dan kesejahteraan pegawai.
4. Penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, pelaksanaan dokumentasi hukum serta kerjasama luar negeri.
5. Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) perhubungan laut serta evaluasi dan pelaporan.
6. Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik serta pengelolaan sistem teknologi informasi.

c. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- 1) Bagian Perencanaan;
- 2) Bagian Keuangan;
- 3) Bagian Kepegawaian;
- 4) Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- 5) Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- 6) Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi tersebut, yaitu:

1) Bagian Perencanaan**a) Tugas Bagian Perencanaan**

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran.

b) Fungsi Bagian Perencanaan

- (1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis dan indikator kinerja, penyusunan rencana kerjasama teknik dan pinjaman/hibah luar negeri, serta kemitraan.
- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, rancangan rencana kerja (RENJA), rencana kerja dan anggaran (RKA), konsep dokumen pelaksanaan anggaran, serta program kerja kemitraan.
- (3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, kinerja, penetapan tarif, pemantauan teknis serah terima hasil kegiatan, pembinaan dan evaluasi layanan pengadaan.

2) Bagian Keuangan

a) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

b) Fungsi Bagian Keuangan

- (1) Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan revisi, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan/audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit aparat fungsional ekstern dan intern, dan onitoning penyelesaian TP/ TGR.
- (2) Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk piutang dan target, monitoring pengelola Anggaran/Barang dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- (3) Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat eselon I: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), koordinasi pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu LK dan monitoring daya serap.

3) Bagian Kepegawaian

a) Tugas Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai serta evaluasi dan pelaporan.

b) Fungsi Bagian Kepegawaian

- (1) Penyusunan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan formasi dan pengangkatan pegawai, serta pengelolaan basis data kepegawaian.
- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan jabatan struktural dan fungsional, asessment, pengangkatan jabatan fungsional tertentu dan kepangkatan pegawai.
- (3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan dan penilaian kinerja pegawai.

4) Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

a) Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan, koordinasi tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan perjanjian Internasional dan kerjasama luar negeri.

b) Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

- (1) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan penelaahan dan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pertimbangan urusan perjanjian dan kerjasama luar negeri di bidang pelayaran.
- (3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi hukum, penyuluhan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum dan koordinasi tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat.

5) Bagian Umum dan Perlengkapan**a) Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan**

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).

b) Fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan

- (1) Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, perencanaan, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan, penyusunan laporan Sistem Informasi manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI.
- (2) Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga, keperluan rapat, pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai, perawatan kendaraan dinas, keprotokolan pelayanan kesehatan kesehatan pegawai.
- (3) Penyiapan bahan inventarisasi/ penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan BMN pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

6) Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

a) Tugas Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Bagian Organisasi dan Hubungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik serta pengelolaan sistem teknologi informasi.

b) Fungsi Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

- (1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penataan organisasi tata laksana dan reformasi birokrasi serta evaluasi organisasi tata laksana dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, standarisasi dan pengembangan sistem komunikasi, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik.
- (3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standarisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/ atau pengelolaan operasional layanan, manajemen resiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem informasi.

I.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2018 yaitu 353 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel 1.3.1 Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1.	S3	0	0
2.	Spesialis	0	0
3.	S2	45	45
4.	S1	125	116
5.	D4	2	2
6.	D3	57	60
7.	D2	0	0
8.	D1	2	2
9.	SLTA	126	117
10.	SLTP	8	7
11.	SD	5	4
TOTAL		370	353

- 2) Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel 1.3.2 Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1.	IV/e	0	0
2.	IV/d	3	1
3.	IV/c	0	0
4.	IV/b	6	4
5.	IV/a	5	5
6.	III/d	51	57
7.	III/c	47	47
8.	III/b	102	89
9.	III/a	69	65
10.	II/d	27	29
11.	II/c	35	32
12.	II/b	18	20
13.	II/a	5	3
14.	I/d	1	1
15.	I/c	1	0
16.	I/b	0	0
17.	I/a	0	0
TOTAL		370	353

I.4. SISTEMATIKA LAPORAN

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab IV : Penutup





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2018

II.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada RENSTRA Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 14 (Empat belas) Sasaran Strategis dan 36 (tiga puluh enam) Indikator Kinerja yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2015 – 2019) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target-target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2015 – 2019.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategik dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (*Performance Contract*). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah dirumuskan tujuan dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2015 – 2019. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan kegiatan dukungan manajemen teknis di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018 (yang telah ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Sekretaris Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 disusun setelah DIPA Tahun 2018 ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang memuat pernyataan Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja tahun 2018 (Awal)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Costumer Perspectives		
Sasaran Strategis (1)		
1. Terselenggaranya administrasi Ditjen Hubla	1) Prosentase peningkatan jumlah pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang bersertifikat	87,64 %
	2) Prosentase kehandalan sistem informasi Ditjen Hubla	80 %
	3) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen Hubla (skala likert 1-5).	4 Nilai
	4) Tingkat Kualitas Akuntabilitas Ditjen Hubla	82,55 %
	5) Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional	95 %
Internal Business Process Perspective		
Sasaran Strategis (2)		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
2. Terlaksananya perencanaan, pemograman, penganggaran, monev dan pentarifan di Ditjen Hubla	6) Jumlah dokumen dan laporan yang disusun terkait SAKIP dan dokumen lainnya	5 Dokumen
	7) Jumlah pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi terkait SAKIP dan Dokumen lainnya	50 Kegiatan
	8) Jumlah Studi dan Kajian yang disusun	5 Dokumen
Sasaran Strategis (3)		
3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara Ditjen Hubla yang akuntabel	9) Jumlah dokumen dan laporan keuangan di lingkungan Ditjen Hubla yang disusun	336 Dokumen
	10) Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi di bidang keuangan	3 Kegiatan
	11) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan	10 Kegiatan
Sasaran Strategis (4)		
4. Terlaksananya fungsi kepegawaian Ditjen Hubla	12) Jumlah penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi	8 Kegiatan
	13) Jumlah penerbitan SK mutasi/kenaikan pangkat/jabatan fungsional	4.142 SK
	14) Prosentase jumlah	50 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	kasus disiplin pegawai yang dapat ditangani sampai selesai	
Sasaran Strategis (5)		
5. Meningkatnya pemenuhan dan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang transportasi laut	15) Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan	20 Dokumen
	16) Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan	8 Dokumen
	17) Jumlah penyelesaian perkara	5 Dokumen
Sasaran Strategis (6)		
6. Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional	18) Jumlah perjanjian kerjasama dalam negeri	6 Dokumen
	19) Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral	2 Dokumen
	20) Jumlah penyelenggaraan pertemuan dalam rangka kerjasama nasional dan internasional	18 Kegiatan
Sasaran Strategis (7)		
7. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	21) Persentase penatausahaan administrasi perkantoran	100 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	22) Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional kerumahtanggaan	100 %
	23) Nilai BMN pada neraca Ditjen Perhubungan Laut	Rp. 48.834.429.426.1 25
Sasaran Strategis (8)		
8. Meningkatnya Kinerja Kehumasan Ditjen Hubla	24) Jumlah kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat	5 Kegiatan
	25) Jumlah kegiatan kehumasan dan protokoler	14 Kegiatan
Sasaran Strategis (9)		
9. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Ditjen Hubla	26) Jumlah kegiatan pembangunan/pengembangan Pemeliharaan informasi yang berbasis teknologi informasi (IT)	2 Kegiatan
Sasaran Strategis (10)		
10. Terlaksananya Fungsi Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	27) Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi terkait RB	4 Kegiatan
	28) Jumlah dokumen RB yang disusun	1 Kegiatan
Learn and Growth Perspective		
Sasaran Strategis (11)		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
11. Tersedianya SDM Setditjen Hubla yang Kompeten dan Profesional	29) Jumlah SDM Setditjen yang mengikuti diklat/bimtek	27 Orang
Learn and Growth Perspective		
Sasaran Strategis (12)		
12. Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Setditjen Hubla	30) Jumlah sistem dan informasi di lingkungan Setditjen Hubla	1 Unit
	31) Persepsi publik terkait pelayanan informasi di Setditjen Hubla (1-10)	9 Nilai
Sasaran Strategis (13)		
13. Terwujudnya good governance dan clean government di Setditjen Hubla	32) Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	4 Dokumen
Sasaran Strategis (14)		
14. Terkelolanya anggaran Setditjen Hubla secara Optimal	33) Presentase penyerapan anggaran Setditjen Hubla	100 %
	34) Nilai kinerja anggaran Setditjen Hubla	80 %
	35) Nilai BMN Setditjen Hubla	Rp. 4.040.035.615.382
	36) Target PNPB Setditjen Hubla	Rp. 73.206.150.000

Tabel 2.2.2 Reviu Perjanjian Kinerja tahun 2018 (Terakhir)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Costumer Perspectives		
Sasaran Strategis (1)		
1. Terselenggaranya administrasi Ditjen Hubla	1) Prosentase peningkatan jumlah pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang bersertifikat	80 %
	2) Prosentase kehandalan sistem informasi Ditjen Hubla	80 %
	3) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen Hubla (skala likert 1-5).	4 Nilai
	4) Tingkat Kualitas Akuntabilitas Ditjen Hubla	82,55 %
	5) Persentase penyerapan anggaran Ditjen Hubla	80 %
Internal Business Process Perspective		
Sasaran Strategis (2)		
2. Terlaksananya perencanaan, pemograman, penganggaran, monev dan pentarifan di Ditjen Hubla	6) Jumlah dokumen dan laporan yang disusun terkait SAKIP dan dokumen lainnya	5 Dokumen
	7) Jumlah pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi terkait SAKIP dan Dokumen lainnya	50 Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	8) Jumlah Studi dan Kajian yang disusun	2 Dokumen
Sasaran Strategis (3)		
3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara Ditjen Hubla yang akuntabel	9) Jumlah dokumen dan laporan keuangan di lingkungan Ditjen Hubla yang disusun	336 Dokumen
	10) Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi di bidang keuangan	3 Kegiatan
	11) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan	10 Kegiatan
Sasaran Strategis (4)		
4. Terlaksananya fungsi kepegawaian Ditjen Hubla	12) Jumlah penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi	8 Kegiatan
	13) Jumlah penerbitan SK mutasi/kenaikan pangkat/jabatan fungsional	4.142 SK
	14) Prosentase jumlah kasus disiplin pegawai yang dapat ditangani sampai selesai	50 %
Sasaran Strategis (5)		
5. Meningkatnya pemenuhan dan efektivitas	15) Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan	20 Dokumen

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
pelaksanaan regulasi di bidang transportasi laut		
	16) Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan	8 Dokumen
	17) Jumlah penyelesaian perkara	5 Dokumen
Sasaran Strategis (6)		
6. Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional	18) Jumlah perjanjian kerjasama dalam negeri	6 Dokumen
	19) Jumlah perjanjian kerjasama regional multilateral, bilateral, dan	2 Dokumen
	20) Jumlah penyelenggaraan pertemuan dalam rangka kerjasama nasional dan internasional	18 Kegiatan
Sasaran Strategis (7)		
7. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	21) Persentase penatausahaan administrasi perkantoran	100 %
	22) Persentase pelaksanaan administrasi operasional kerumahaan dan	100 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	23) Nilai BMN pada neraca Ditjen Perhubungan Laut	Rp. 48.834.429.426.125
Sasaran Strategis (8)		
8. Meningkatnya Kinerja Kehumasan Ditjen Hubla	24) Jumlah kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat	4 Kegiatan
	25) Jumlah kegiatan kehumasan dan protokoler	14 Kegiatan
Sasaran Strategis (9)		
9. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Ditjen Hubla	26) Jumlah kegiatan pembangunan/pengembangan Pemeliharaan informasi yang berbasis teknologi informasi (IT)	2 Kegiatan
Sasaran Strategis (10)		
10. Terlaksananya Fungsi Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	27) Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi terkait RB	4 Kegiatan
	28) Jumlah dokumen RB yang disusun	4 Kegiatan
Learn and Growth Perspective		
Sasaran Strategis (11)		
11. Tersedianya SDM Setditjen Hubla yang Kompeten dan Profesional	29) Jumlah SDM Setditjen yang mengikuti diklat/bimtek	27 Orang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Learn and Growth Perspective		
Sasaran Strategis (12)		
12. Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Setditjen Hubla	30) Jumlah sistem dan informasi di lingkungan Setditjen Hubla	1 Unit
	31) Persepsi publik terkait pelayanan informasi di Setditjen Hubla (1-10)	9 Nilai
Sasaran Strategis (13)		
13. Terwujudnya good governance dan clean government di Setditjen Hubla	32) Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	5 Dokumen
Sasaran Strategis (14)		
14. Terkelolanya anggaran Setditjen Hubla secara Optimal	33) Presentase penyerapan anggaran Setditjen Hubla	80 %
	34) Nilai kinerja anggaran Setditjen Hubla	80 %
	35) Nilai BMN Setditjen Hubla	Rp. 4.040.035.615.382
	36) Target PNBP Setditjen Hubla	Rp. 73.206.150.000





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2018

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. **Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. **Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pada tahun anggaran 2018 Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis untuk mendukung pencapaian kelima sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian

sasaran tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah merumuskan beberapa indikator Kinerja. Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya di atas 80% dan apabila pencapaiannya di bawah 80 % maka dianggap kurang berhasil.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



III.2 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018

Tabel 3.3.1
Pencapaian Kinerja Setditjen Hubla Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SS. 1	Terselenggaranya administrasi Ditjen Hubla	IKU.1 Prosentase peningkatan jumlah pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang bersertifikat	%	80	17,43	35,95	58,92	98,96	98,96	123,70
		IKU.2 Prosentase kehandalan sistem informasi Ditjen Hubla	%	80	0	0	66,32	80	80	100
		IKU.3 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen Hubla (skala likert 1-5)	Nilai	4	0	0	3,86	4	4	100
		IKU.4 Tingkat Kualitas Akuntabilitas Ditjen Hubla	%	82,55	0	0	86,22	86,22	86,22	104
		IKU.5 Persentase penyerapan anggaran Ditjen Hubla	%	80	6,8	19,23	33,88	71,45	71,45	89.3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SS. 2	Terlaksananya perencanaan, pemograman, penganggaran, monev dan pentarifan di Ditjen Hubla	IKU.6 Jumlah dokumen dan laporan yang disusun terkait SAKIP dan dokumen lainnya	Dokumen	5	4	4	4	5	5	100
		IKU.7 Jumlah pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi terkait SAKIP dan Dokumen lainnya	Kegiatan	50	9	30	37	50	50	100
		IKU.8 Jumlah Studi dan Kajian yang disusun	Dokumen	2	0	0	4	4	4	200
SS.3	Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara Ditjen Hubla yang akuntabel	IKU.9 Jumlah dokumen dan laporan keuangan di lingkungan Ditjen Hubla yang disusun	Dokumen	336	0	0	168	336	336	100
		IKU.10 Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi di bidang keuangan	Kegiatan	3	1	2	3	3	3	100
		IKU.11 Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan	Kegiatan	10	2	4	7	9	9	90
SS.4	Terlaksananya fungsi kepegawaian Ditjen Hubla	IKU.12 Jumlah penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi	Kegiatan	8	0	0	2	8	8	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
		IKU.13 Jumlah penerbitan SK mutasi/kenaikan pangkat/jabatan fungsional	SK	4.142	1.352	4.869	5.774	7.282	7.282	175,81
		IKU.14 Prosentase jumlah kasus disiplin pegawai yang dapat ditangani sampai selesai	%	50	22,63	38,69	53,28	72,26	72,26	122,26
SS.5	Meningkatnya pemenuhan dan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang transportasi laut	IKU.15 Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan	Dokumen	20	4	8	10	10	10	50
		IKU.16 Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan	Dokumen	8	0	4	4	9	9	112
		IKU.17 Jumlah penyelesaian perkara	Dokumen	5	6	6	6	7	7	140
SS.6	Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional	IKU.18 Jumlah perjanjian kerjasama dalam negeri	Dokumen	6	1	5	5	7	7	116
		IKU.19 Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral	Dokumen	2	0	0	0	2	2	100
		IKU.20 Jumlah penyelenggaraan pertemuan dalam rangka kerjasama	Kegiatan	18	2	6	8	18	18	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SS.7	Terlaksananya pembinaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan penatausahaan	nasional dan internasional								
		IKU. 21 Persentase penatausahaan administrasi perkantoran	%	100	2.19	9.12	33.44	82.33	82.33	82.33
		IKU. 22 Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional kerumahtanggaan	%	100	5.58	34.24	55.99	85.24	85.24	85.24
		IKU. 23 Nilai BMN pada neraca Ditjen Perhubungan Laut	Rp.	48.834.429.426.125	13.544.634.417.538	27.089.268.835.077	40.633.903.252.615	54.178.537.670.153	54.178.537.670.153	110.9
SS.8	Meningkatnya Kinerja Kehumasan Ditjen Hubla	IKU.24 Jumlah kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat	Kegiatan	4	2	5	5	5	5	125
		IKU.25 Jumlah kegiatan kehumasan dan protokoler	Kegiatan	14	6	6	9	17	17	121
SS.9	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi	IKU.26 Jumlah kegiatan pembangunan/pengembangan Pemeliharaan informasi yang berbasis teknologi informasi (IT)	Kegiatan	2	1	1	1	2	2	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
	Ditjen Hubla									
SS.10	Terlaksananya Fungsi Managemen Organisasi dan Tata Laksana	IKU.27 Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi terkait RB	Kegiatan	4	0	1	1	4	4	100
		IKU.28 Jumlah dokumen RB yang disusun	Kegiatan	4	0	1	1	4	4	100
SS.11	Tersedianya SDM Setditjen Hubla yang Kompeten dan Profesional	IKU.29 Jumlah SDM Setditjen yang mengikuti diklat/bimtek	Orang	27	0	3	8	20	20	74,07
SS.12	Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Setditjen Hubla	IKU.30 Jumlah sistem dan informasi di lingkungan Setditjen Hubla	Unit	1	1	1	1	1	1	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
		IKU.31 Persepsi publik terkait pelayanan informasi di Setditjen Hubla (1-10) (Bag. Ortala)	Nilai	9	8	8	8	8	8	88,8
SS.13	Terwujudnya good governance dan clean government di Setditjen Hubla	IKU.32 Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5	4	4	4	5	5	100
SS.14	Terkelolanya anggaran Setditjen Hubla secara Optimal	IKU.33 Persentase penyerapan anggaran Setditjen Hubla	%	80	10,29	24,36	40,65	87,12	87,12	108
		IKU.34 Nilai kinerja anggaran Setditjen Hubla	%	80	10,29	24,36	40,65	87,14	87,14	108,92
		IKU.35 Nilai BMN Setditjen Hubla (Bag. Umum & Perlengkapan)	Rp	4.040.035.615.382	1.384.814.000	1.434.922.500	884.861.000	9.823.434.500	9.823.434.500	96.73
		IKU.36 Target PNPB Setditjen Hubla	Rp	73.206.150.000	5.424.423.569	4.263.977.887	6.481.490.868	78.300.863.013	78.300.863.013	106,96



III.3 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS (1)

Sasaran strategis **Terselenggaranya administrasi Ditjen Hubla** terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) **Prosentase peningkatan jumlah pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang bersertifikat**

Tabel 3.3.2

Prosentase peningkat jumlah pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang bersertifikat

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 1	Prosentase peningkatan jumlah pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang bersertifikat	%	80	17,43	35,95	58,92	98,96	98,96	123,70

sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 80%, posisi di jumlah SDM kumulatif tahun 2018 sebesar 6.899 (enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) didapat dari:

Baseline 2017	: 4.782
<u>Realisasi 2018</u>	<u>: 2.117</u>
Kumulatif 2018	: 6.899

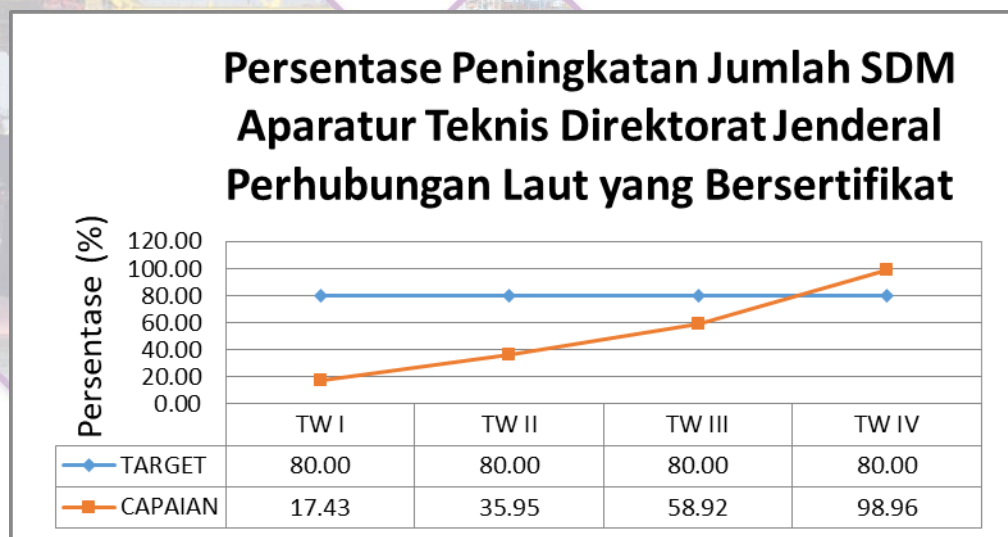
Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi 5.169 (lima ribu seratus enam puluh sembilan) orang, sampai dengan Triwulan II terdapat realisasi 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) orang, sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi sebesar 6.010 (enam ribu sepuluh) orang, dan sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 6.899 (enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) orang.

Tabel 3.3.3

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)

	TW I	TW II	TW III	TW IV
TARGET	7.500	7.500	7.500	7.500
CAPAIAN	5.169	5.580	6.010	6.899

Grafik 3.3.1 Prosentase Peningkatan Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang Bersertifikat



Secara kumulatif, sampai dengan tahun 2018 jumlah SDM transportasi laut yang bersertifikat (aparatur teknis) sebanyak 6.899 (enam ribu delapan ratus Sembilan puluh sembilan) orang, dan khusus di tahun anggaran 2018 realisasi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis) sebanyak 2.117 (dua ribu seratus tujuh belas) orang yang terdiri dari :

Tabel 3.3.4

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
1	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	30
2	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
3	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
4	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
5	Penyelenggara Pelabuhan dan Otoritas	30
6	Ksyahbandaran klas B	30
7	Teknis Terpadu Bidang Perhub Laut	28
8	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
9	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
10	Maritime English	29
11	Teknis Terpadu Bidang Perhub Laut	30
12	VTS (Operator)	30
13	Basic Commercial Survey	30
14	Dasar Bintara KPLP	30
15	Maritime English	30
16	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
17	Ksyahbandaran klas B	30
18	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
19	Intermediate Commercial Survey	28
20	Pengawas Pemanduan	30
21	Penanganan Muatan Berbahaya	30
22	Auditor ISM Code	26
23	Peningkatan Kompetensi SDM Bongkar Muat	30
24	Marine Inspector Type B	29
25	Isps Code	29
26	Penanggulangan Pencemaran Tingkat I	29
27	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
28	Penanganan Muatan Berbahaya	29
29	Marine Inspector Type B	30
30	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
31	Pengukuran Kapal	30
32	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
33	Pencegahan Pencemaran	26
34	Sea and Coast Guard	21
35	Port State Control (PSC)	25
36	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
37	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
38	Ksyahbandaran klas B	30
39	Pengukuran Kapal	30
40	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	29
41	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
42	Penyelenggara Pelabuhan dan Otoritas	30
43	Marine Inspector Type A	30
44	Maritime English	29

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
45	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
46	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
47	Penanganan Muatan Berbahaya	30
48	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	28
49	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	27
50	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	30
51	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	29
52	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	28
53	Ksyahbandaran klas A	27
54	Auditor ISM Code	30
55	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	29
56	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	29
57	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	25
58	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	28
59	Dasar Bintara KPLP	24
60	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	27
61	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	24
62	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	28
63	VTS (Operator)	30
64	Pencegahan Pencemaran	28
65	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	27
66	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	28
67	Penanganan Muatan Berbahaya	30
68	Pencegahan Pencemaran	23
69	Penanganan Muatan Berbahaya	22
70	Penanganan Muatan Berbahaya	22
71	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	27
72	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
73	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
74	Teknis Awal Dasar - Dasar Kesyahbandaran	30
JUMLAH		2117

2) Persentase Kehandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,

Tabel 3.3.5

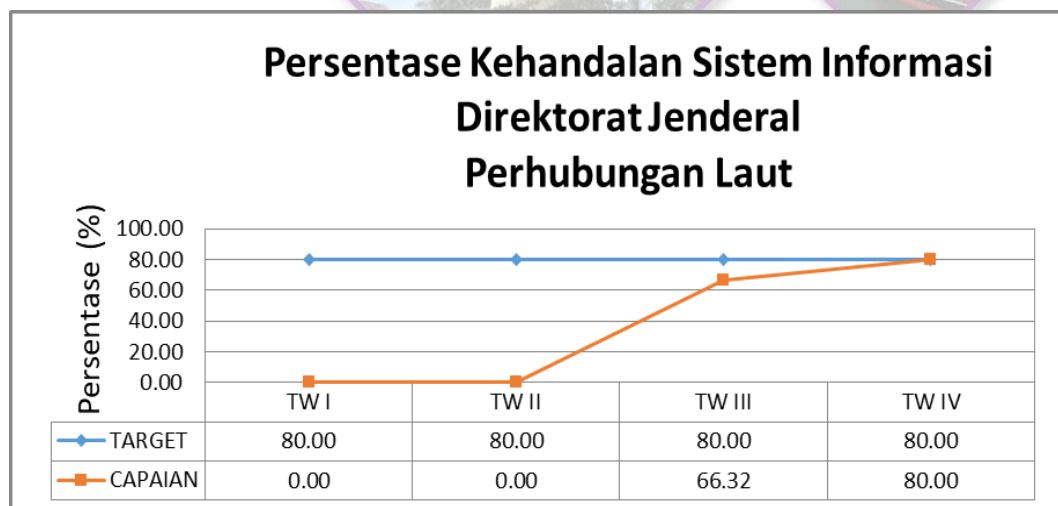
Persentase Kehandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 2	Prosentase kehandalan sistem informasi Ditjen Hubla	%	80	0	0	66,32	80	80	100

adapun sesuai dengan target pada tahun 2018 sebesar 80% dan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III belum terdapat realisasi, hal itu disebabkan karena masih ada beberapa perbaikan dan juga integrasi dengan instansi lain yang masih dalam progres sehingga prosentase pencapaian sebesar 66,32% dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80% pada triwulan IV.

Grafik 3.3.2

Persentase Kehandalan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



3) **Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Skala Likert 1-5),**

Tabel 3.3.6

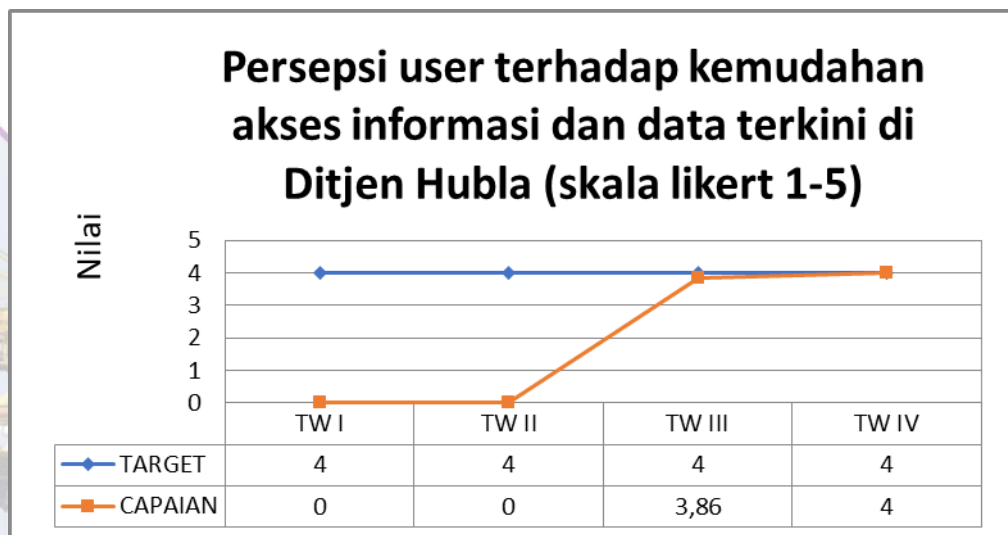
Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Data Terkini Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Skala Likert 1-5),

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 3	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen Hubla (skala likert 1-5)	Nilai	4	0	0	3,86	4	4	100

adapun sesuai dengan target pada tahun 2018 sebesar 4 (Empat) Nilai dan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan II tidak terdapat realisasi, sedangkan pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 3.86 Nilai dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 4 (empat) Nilai sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%, sehingga sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.3.3

Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (skala likert 1-5)



Persepsi User terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan melakukan survey yang ditayangkan melalui *Pop up* di portal Perhubungan Laut terhadap kurang lebih 51 (lima puluh satu) pengunjung pada kurun waktu tertentu, dengan skala likert (sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, sangat tidak puas) dengan table poin sebagai berikut:

Tabel. III.3.7
Tabel Skala Likert

Skala Likert	Poin
Sangat puas	5
Puas	4
Cukup puas	3
Tidak puas	2
Sangat tidak puas	1

Hasil jawaban dari lima puluh satu responden sebagai berikut:

- a) 13 responden menjawab sangat puas;
- b) 21 responden menjawab puas;
- c) 14 responden menjawab cukup puas;
- d) 3 responden menjawab tidak puas;
- e) 0 responden menjawab sangat tidak puas;

Dari data yang didapat di atas kemudian diolah dengan dengan cara mengalikan setiap poin jawaban dengan bobot yang sudah ditentukan dengan table bobot nilai, maka hasil penghitungan jawaban responden sebagai berikut:

- a) Responden yang menjawab sangat puas (5) = $13 \times 5 = 65$
- b) Responden yang menjawab puas (4) = $21 \times 4 = 84$
- c) Responden yang menjawab cukup puas (3) = $14 \times 3 = 42$
- d) Responden yang menjawab tidak puas (2) = $3 \times 2 = 6$
- e) Responden yang menjawab sangat tidak puas (1) = $1 \times 0 = 0$

Total skor = $65 + 84 + 42 + 12 + 0 = 197$

Dari total skor 197 dibagi lima puluh satu responden sehingga mendapatkan rata-rata nilai 3,86 yang berarti puas.

4) Tingkat Kualitas Akuntabiliitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tabel 3.3.8

Tingkat Kualitas Akuntabiliitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

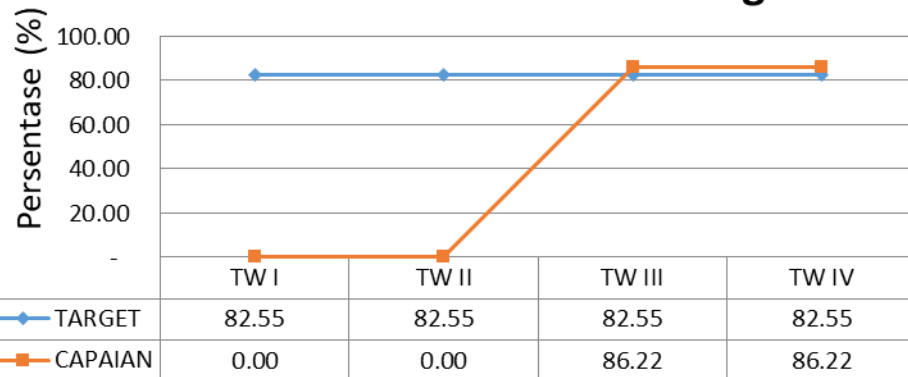
INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 4	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Ditjen Hubla	%	82,55	0	0	86,22	86,22	86,22	104

adapun sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 82,55 terlihat pada Triwulan I dan II belum terdapat prosentase pencapaian, pada triwulan III sampai dengan triwulan IV terdapat realisasi nilai AKIP sebesar 86,22 sehingga prosentase capaian kinerja sebesar 104%

Grafik 3.3.4

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



Pada tahun 2018 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.9

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

No	Komponen	Nilai Per Komponen
1.	Perencanaan kinerja (30%)	25,76
2.	Pengukuran kinerja (25%)	21,15
3.	Pelaporan kinerja (15%)	13,89
4.	Evaluasi internal (10%)	8,19
5.	Pencapaian kinerja (20%)	17,24
NILAI TOTAL		86,22
KATEGORI		A

5) Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen Hubla

Tabel 3.3.10

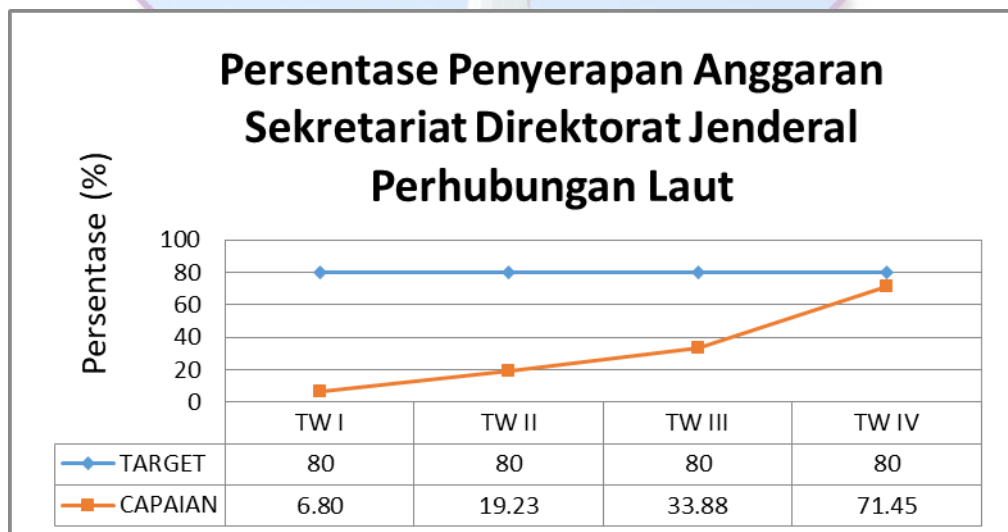
Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen Hubla

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 5	Persentase penyerapan anggaran Ditjen Hubla	%	80	6,8	19,23	33,88	71,45	71,45	89,3

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 80% dan terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi 6,80%, sampai dengan Triwulan II terdapat realisasi 19.23%, sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi 33.88% sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi 71.45% dan prosentase pencapaian sebesar 89,3% sehingga belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.3.5 Prosentase Penyerapan Anggaran



Adapun faktor penyebab belum tercapai sesuai target antara lain :

1. Gagal Lelang
2. Permasalahan Lahan

3. Kontrak di akhir tahun
4. Waktu pelaksanaan kegiatan tidak cukup

SASARAN STRATEGIS (2)

Sasaran strategis **Terlaksananya perencanaan, pemograman, penganggaran, monev dan pentarifan di Ditjen Hubla** terdiri dari 3 (tiga)

Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 6) **Jumlah Dokumen dan Laporan yang Disusun Terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya.**

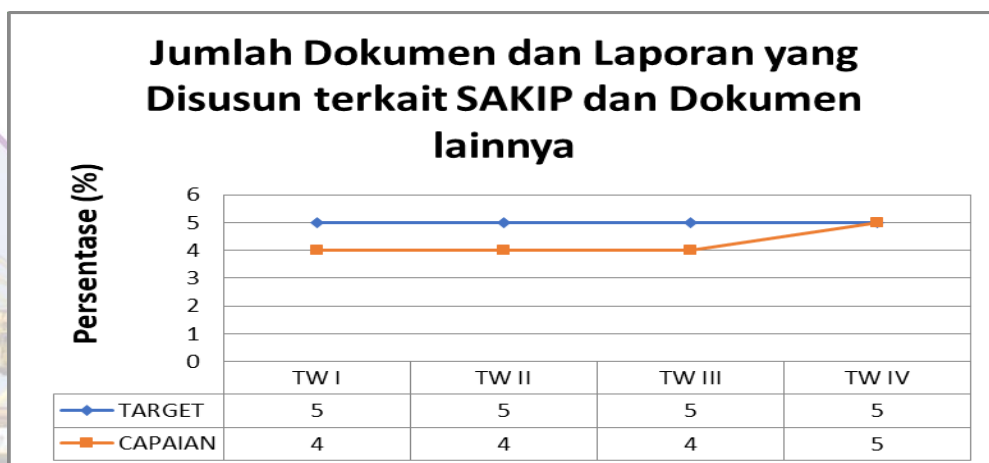
Tabel 3.3.11

Jumlah Dokumen dan Laporan yang Disusun Terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 6	Jumlah dokumen dan laporan yang disusun terkait SAKIP dan dokumen lainnya	Dokumen	5	4	4	4	5	5	100

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 5 (Lima) Dokumen terlihat pada Triwulan I sampai dengan triwulan III terdapat realisasi sebesar 4 (Empat) dan terlihat pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 5 (lima) Dokumen sehingga prosentase realisasinya sebesar 100% sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Grafik 3.3.6 Jumlah Dokumen SAKIP dan dokumen lainnya



Adapun Dokumen SAKIP yang telah disusun yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019
 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
 3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018
 4. Rencana Aksi (Renaksi) Atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018
 5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
- 7) **Jumlah Pembinaan, Sosialisasi, dan Koordinasi Terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya**

Tabel 3.3.12

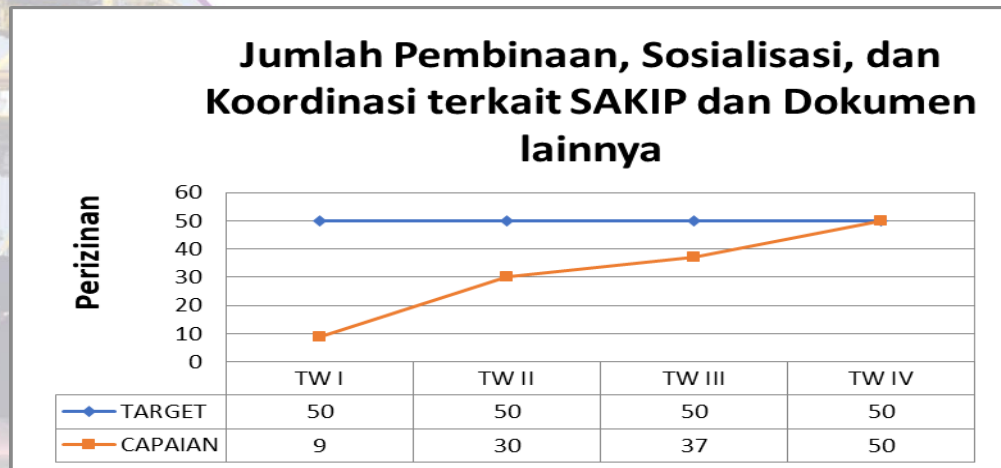
Jumlah Pembinaan, Sosialisasi, dan Koordinasi Terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 7	Jumlah pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi terkait SAKIP dan Dokumen lainnya	Kegiatan	50	9	30	37	50	50	100

Adapun sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 50 (Lima puluh) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 9 (sembilan)

Dokumen, untuk Triwulan II realisasi sebesar 30 (tiga puluh) Dokumen dan pada Triwulan III realisasi sebesar 37 (tiga puluh tujuh) Dokumen, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 50 (Lima Puluh) Kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 100% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.3.7 Prosentase Penyerapan Anggaran



8) Jumlah Studi dan Kajian Yang Disusun

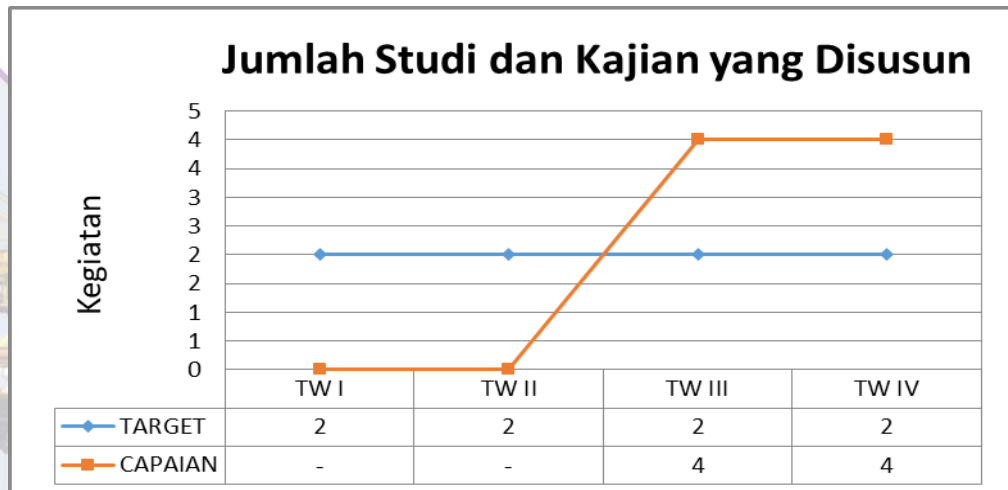
Tabel 3.3.13

Jumlah Studi dan Kajian yang Disusun

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 8	Jumlah Studi dan Kajian yang disusun (Bag. Perencanaan)	Dokumen	2	0	0	4	4	4	200

Adapun sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 2 (Dua) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan II belum terdapat realisasi sedangkan pada Triwulan III sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 4 (Empat) Dokumen sehingga prosentase pencapaian sebesar 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.3.8 Jumlah Studi dan Kajian yang Disusun



Adapun Studi dan Kajian yang disusun sebagai berikut :

1. Studi *Pra Feasibility Studi (FS)* pada 18 Lokasi
2. Studi Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut pada 12 Lokasi
3. Kajian *Pra Rencana Strategis* Tahun 2020 – 2024
4. Kajian Penurunan Emisi

SASARAN STRATEGIS (3)

Sasaran strategis **Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara Ditjen Hubla yang akuntabel** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut

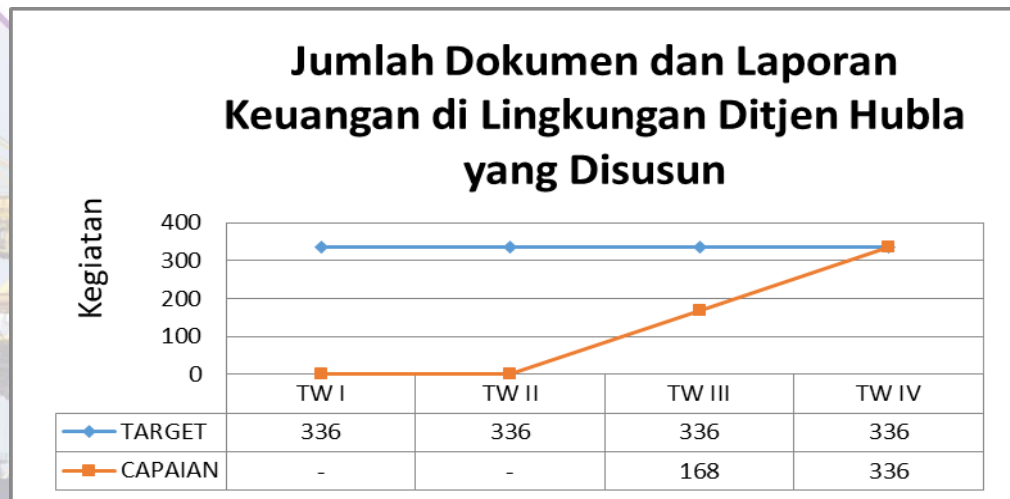
- 9) **Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Hubla yang Disusun**

Tabel 3.3.14

Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Hubla yang Disusun

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 9	Jumlah dokumen dan laporan keuangan di lingkungan Ditjen Hubla yang disusun	Dokumen	336	0	0	168	336	336	100

Grafik 3.3.9 Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Hubla yang Disusun



10) Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi di Bidang Keuangan

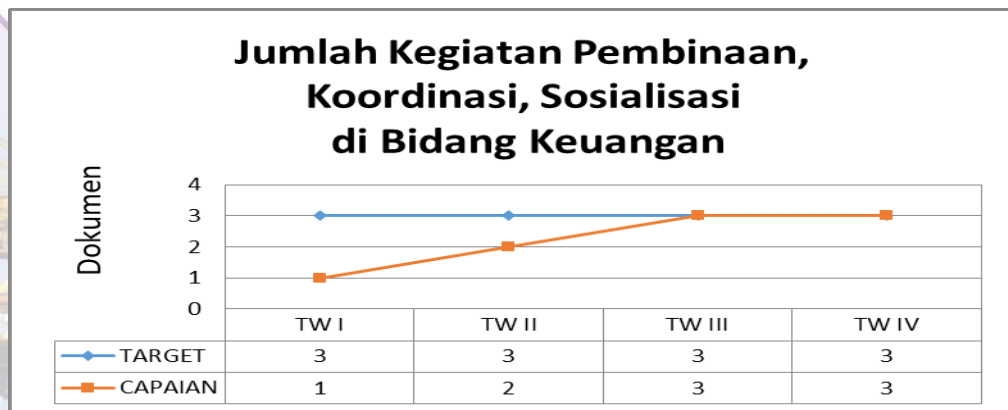
Tabel 3.3.15

Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi di Bidang Keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 10	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi di bidang keuangan	Kegiatan	3	1	2	3	3	3	100

Adapun sesuai dengan target tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) Kegiatan. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebanyak 1 (satu) kegiatan, untuk Triwulan II realisasi sebanyak 2 (dua) Kegiatan, pada Triwulan III realisasi sebanyak 3 (tiga) kegiatan, dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebanyak 3 (tiga) Kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

Grafik 3.3.10 Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi di Bidang Keuangan



Adapun Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi di bidang keuangan sebagai berikut :

1. Monitoring PNBPN;
2. Bimtek SPIP;
3. Pembinaan PNBPN.

11) Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keuangan

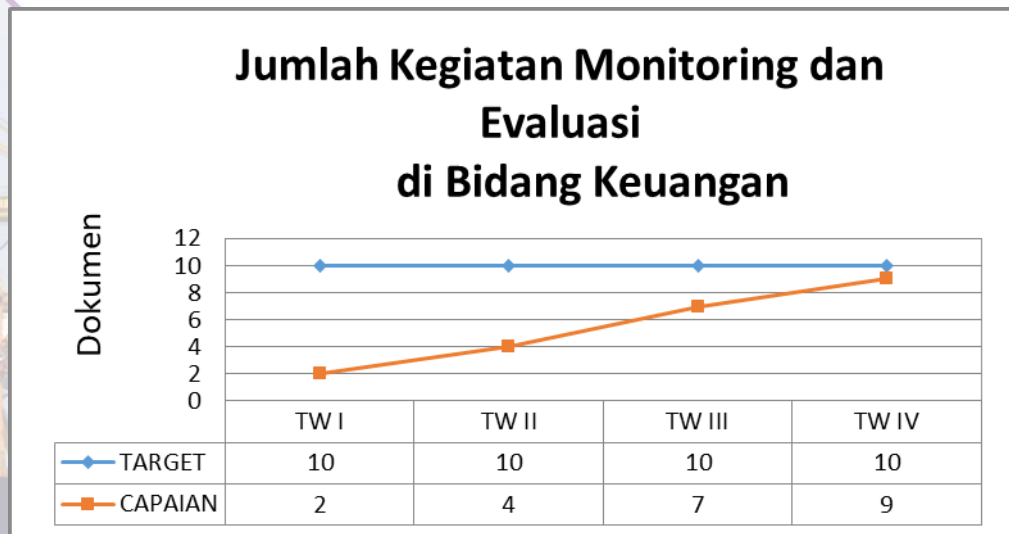
Tabel 3.3.16

Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 11	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan	Kegiatan	10	2	4	7	9	9	90

adapun sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 10 (sepuluh) kegiatan. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 2 (dua) kegiatan, untuk Triwulan II realisasi sebesar 4 (empat) kegiatan dan pada Triwulan III realisasi sebesar 7 (tujuh) kegiatan, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 9 (sembilan) kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 90%

**Grafik 3.3.11 Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
di Bidang Keuangan**



Adapun jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Laporan Keuangan (SAI) Tahunan di Lingkungan Ditjen Hubla. Jumlah Dokumen 330;
2. Evaluasi Laporan Keuangan Berbasis AkruaI Tingkat UAPPA-W di lingkungan Ditjen Hubla, 330 dokumen;
3. Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester I TA. 2018. 330 Dokumen SAI dan SIMAK-BMN UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA pada UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada bulan April;
5. Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA pada UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada bulan Juli;
6. Evaluasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Transportasi Laut Semester II TA. 2017;
7. Evaluasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Transportasi Laut Semester I TA. 2018;

8. Evaluasi Laporan Keuangan Berbasis Akrua Tingkat UAPPA-W di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
9. Laporan Keuangan dan Neraca Tingkat UAPPA-W dan UAPPA-E1 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Adapun 1 (satu) kegiatan yang tidak terlaksana pada bulan adalah kegiatan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran yang dilaksanakan pada bulan Oktober, dikarenakan pada bulan ini ada kegiatan Inventarisasi Data, dimana dalam kegiatan tersebut data dukung yang dibutuhkan terkait *Updating Data* Perubahan Dokumen Anggaran sudah terpenuhi.

SASARAN STRATEGIS (4)

Sasaran strategis **Terlaksananya fungsi kepegawaian Ditjen Hubla** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

12) Jumlah Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi

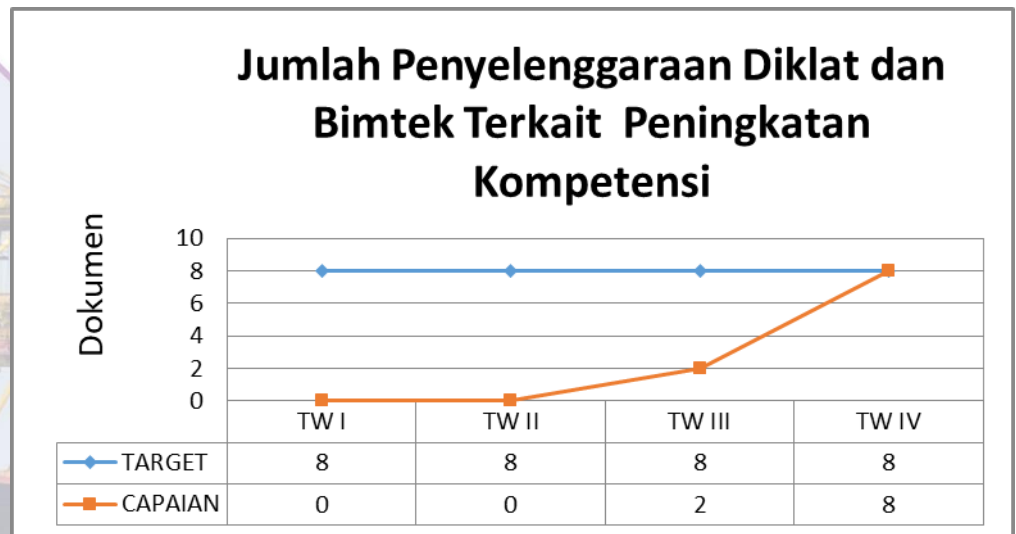
Tabel 3.3.17

Jumlah Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 12	Jumlah penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi	Kegiatan	8	0	0	2	8	8	100

adapun sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 8 (delapan) kegiatan. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 0 (nol) kegiatan, untuk Triwulan II realisasi sebesar 0 (nol) kegiatan dan pada Triwulan III realisasi sebesar 2 (dua) kegiatan, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 8 (delapan) kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%.

**Grafik 3.3.12 Jumlah Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek
Terkait Peningkatan Kompetensi**



Adapun Jumlah penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi sebagai berikut :

1. Keahlian dan Keterampilan Pelaut terkait Basic Safety Training.
2. Penyegaran Port Management.
3. Pemutakhiran Kompetensi Keahlian Pelaut.
4. Peningkatan Kompetensi SDM Bendahara Penerima dan Pengeluaran.
5. Sosialisasi dan Bimtek PM 41 tahun 2017 melalui aplikasi.
6. Penyusunan Aplikasi E-Lapkin tahun 2017 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
7. Pelatihan manajemen Leadership.
8. Pembinaan dan Pengelolaan Database Kepegawaian berbasis web, supervisi subadmin database kepegawaian serta validasi pengelola kepegawaian.

13) Jumlah penerbitan SK Mutasi/Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

3.3.18

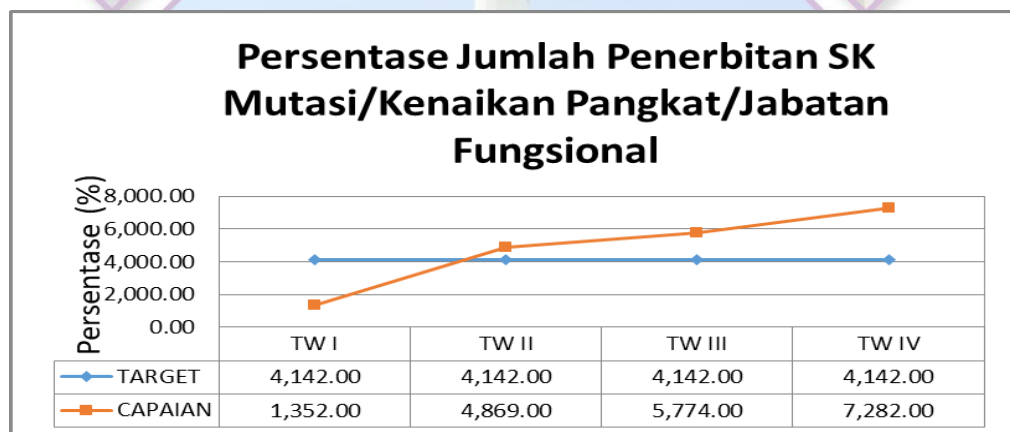
Jumlah penerbitan SK Mutasi/Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	KINERJA (%)
-----------	--------	--------	---------------------------------	----------------

KINERJA UTAMA				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 13	Jumlah penerbitan SK mutasi/kenaikan pangkat/jabatan fungsional	SK	4.142	1.352	4.869	5.774	7.282	7.282	175,81

adapun sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 4.142 (empat ribu seratus empat puluh dua) SK. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 1.352 SK, untuk Triwulan II realisasi sebesar 3.517 SK dan pada Triwulan III realisasi sebesar 905 SK, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 1.508 SK sehingga prosentase pencapaian sebesar 175,81% dan melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena banyaknya terjadi mutasi pejabat di tahun 2018.

Grafik 3.3.13 Jumlah Penerbitan SK Mutasi/Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional



14) Prosentase Jumlah Kasus Disiplin Pegawai yang Dapat Ditangani Sampai Selesai,

Tabel 3.3.19

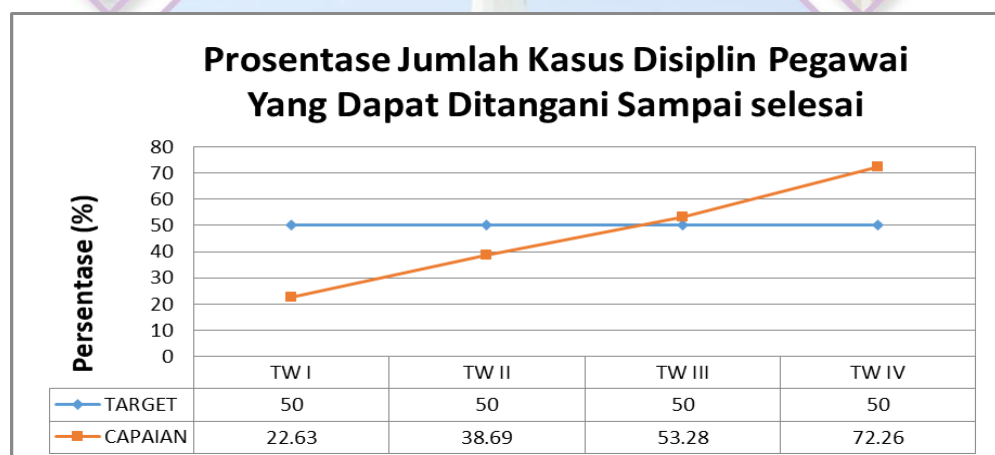
Prosentase Jumlah Kasus Disiplin Pegawai yang Dapat Ditangani Sampai Selesai

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	KINERJA (%)
-----------	--------	--------	------------------------------	-------------

KINERJA UTAMA				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 14	Prosentase jumlah kasus disiplin pegawai yang dapat ditangani sampai selesai	%	50	22,63	38,69	53,28	72,26	72,26	122,26

adapun sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 50 (lima puluh)%. Terlihat pada Triwulan I realisasi sebesar 22,63%, pada Triwulan II realisasi sebesar 38,69%, pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 53,28%, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 72,26% sehingga prosentase pencapaian sebesar 122,26%.

Grafik 3.3.14 Prosentase Jumlah Kasus Disiplin Pegawai yang Dapat Ditangani Sampai Selesai



SASARAN STRATEGIS (5)

Sasaran strategis **Meningkatnya pemenuhan dan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang transportasi laut** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

15) Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan

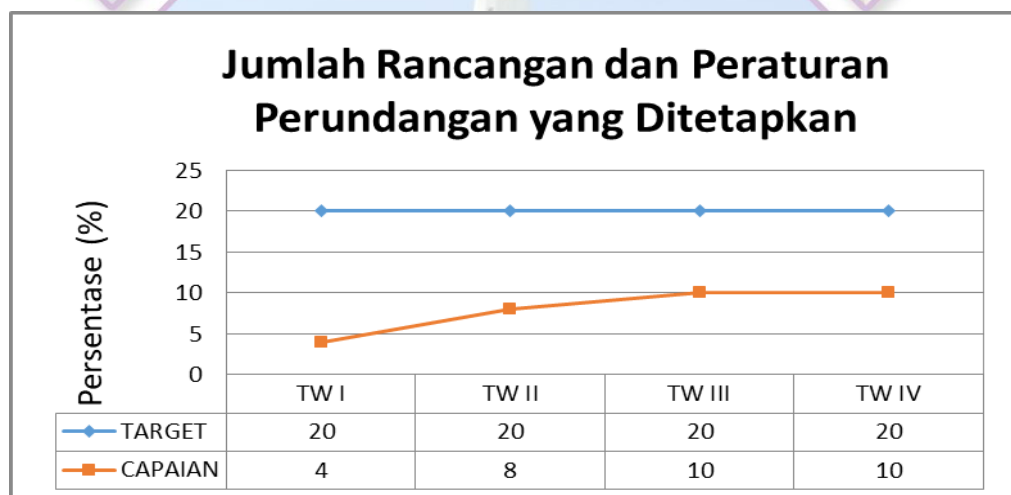
Tabel 3.3.20

Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 15	Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan	Dokumen	20	4	8	10	10	10	50

adapun sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 20 (sepuluh) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 4 (empat) Dokumen, untuk Triwulan II realisasi sebesar 8 (delapan) Dokumen dan pada Triwulan III dan IV realisasi sebesar 10 (sepuluh) Dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 50%.

Grafik 3.3.15 Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan yang Ditetapkan



Adapun Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Pedoman Pengesahan dan Pengujian Buku Catatan Pelatihan Kadet di atas Kapal (*Training Record Book*);

2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Asing;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim;
5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hidrooceanografi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Petunjuk Teknis Standarisasi Kebutuhan Peralatan Survei Hidrooceanografi Pada Distrik Navigasi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Petunjuk Teknis Standarisasi Desain Gedung Laboratorium Pengamatan Laut Pada Distrik Navigasi;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi pelabuhan yang tidak atau belum beroperasi;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Peta Tematik Keselamatan Pelayaran;
10. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Tindak Lanjut Penertiban Perizinan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

16) **Jumlah Peraturan Perundangan yang Telah Disosialisasikan,**

Tabel 3.3.21

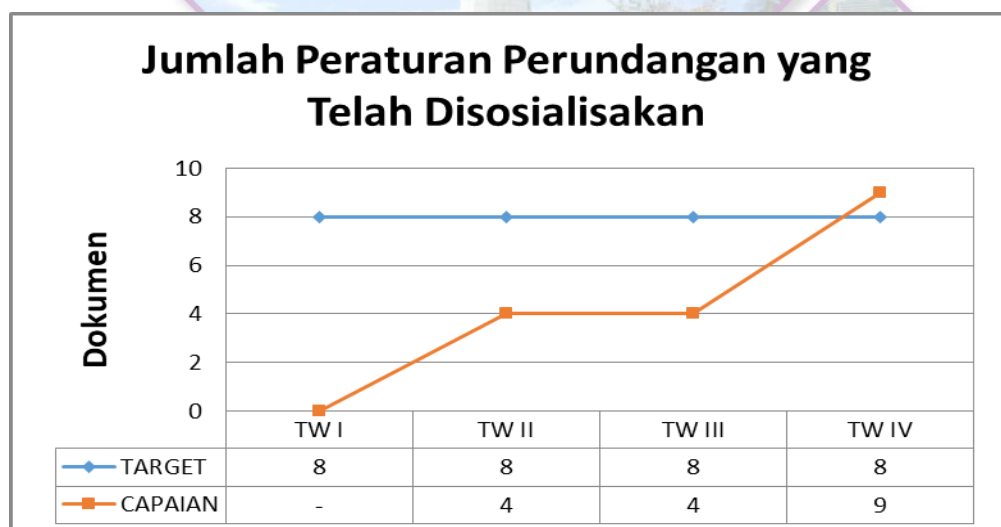
Jumlah Peraturan Perundangan yang Telah Disosialisasikan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 16	Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan	Dokumen	8	0	4	4	9	9	112

adapun sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 8 (delapan) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I belum terdapat realisasi, untuk Triwulan II realisasi sebesar 4 (empat) Dokumen dan pada Triwulan III realisasi sebesar 4 (empat) Dokumen, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 9 (sembilan) Kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 112 % dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.3.16 Jumlah Peraturan Perundangan yang Telah Disosialisasikan



Adapun Jumlah peraturan perundangan yang telah disosialisasikan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Bidang Laut;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
9. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

17) Jumlah Penyelesaian Perkara

Tabel 3.3.22

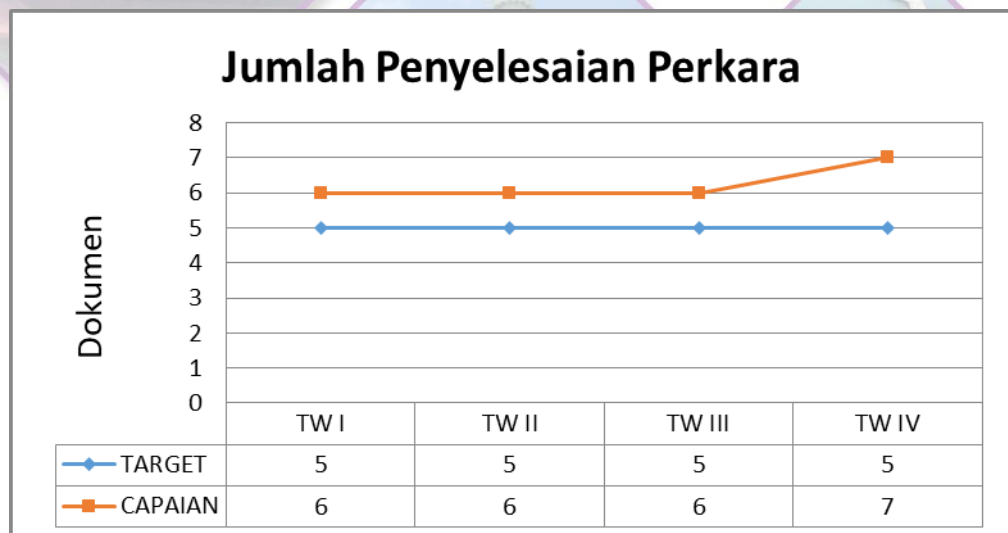
Jumlah Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 17	Jumlah penyelesaian perkara	Dokumen	5	6	6	6	7	7	140

sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 5 (lima) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan triwulan III terdapat realisasi sebesar 6 (enam) Dokumen, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 7 (tujuh) dokumen sehingga prosentase pencapaian melebihi target sebesar 140 %

Grafik 3.3.17 Jumlah Penyelesaian Perkara



Adapun Jumlah Penyelesaian Perkara sebagai berikut:

1. Gugatan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PNDum di Pengadilan Negeri Dumai;
2. Gugatan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Pdl di Pengadilan Negeri Pandeglang;
3. Gugatan Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
4. Gugatan Perkara Perdata Nomor 569/Pdt.G/2018/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan;

5. Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 99/G/2018/PTUN.JKT di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta;
6. Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 102/G/2018/PTUN.SBY di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
7. Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 137/G/2018/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Adapun Jumlah Perkara masih dalam proses persidangan sebagai berikut:

- Gugatan Perkara Perdata Nomor 491/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Pst

SASARAN STRATEGIS (6)

Sasaran strategis **Meningkatnya pemenuhan dan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang transportasi laut** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

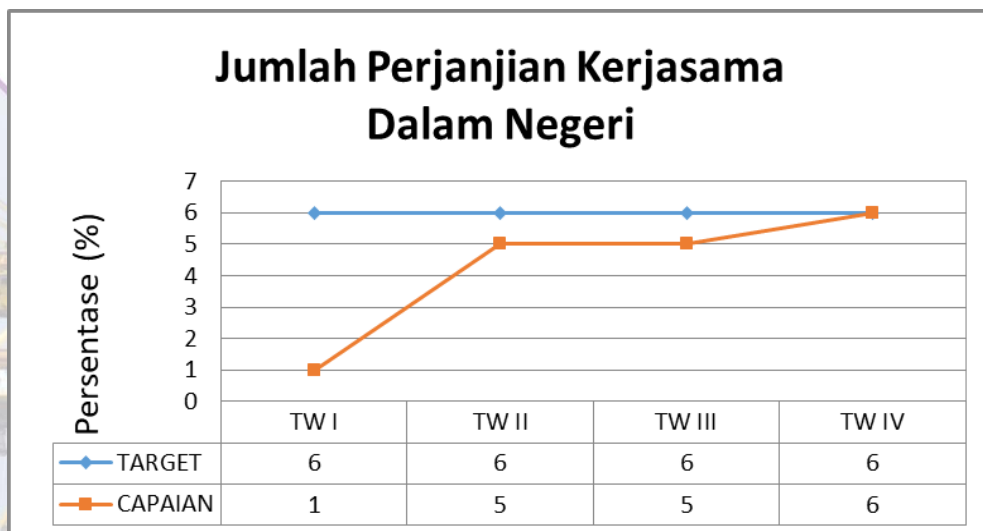
18) Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri

Tabel 3.3.23

Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 18	Jumlah perjanjian kerjasama dalam negeri	Dokumen	6	1	5	5	6	7	116

sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 6 (enam) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 1 (satu) Dokumen, untuk Triwulan II dan III realisasi sebesar 5 (lima) Dokumen dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 7 (tujuh) Kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 116% dan melebihi dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.3.18 Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri

Adapun Jumlah perjanjian kerjasama dalam negeri sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan VTS antara Distrik Navigasi Bitung dengan PT. Pelindo IV;
2. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan VTS antara Distrik Navigasi Makassar dengan PT. Pelindo IV;
3. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan VTS antara Distrik Navigasi Samarinda dengan PT. Pelindo IV (Samarinda dan Balikpapan);
4. Perjanjian Konsesi Terminal Kijing antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak dengan PT. Pelindo II;
5. Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan Tanah Ampo antara Pemerintah Provinsi Bali (Karangasem) dengan Kementerian Perhubungan;
6. Perjanjian Kerjasama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gresik dengan PT. Karyaindah Alam Sejahtera
7. Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

19) Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral

Tabel 3.3.24

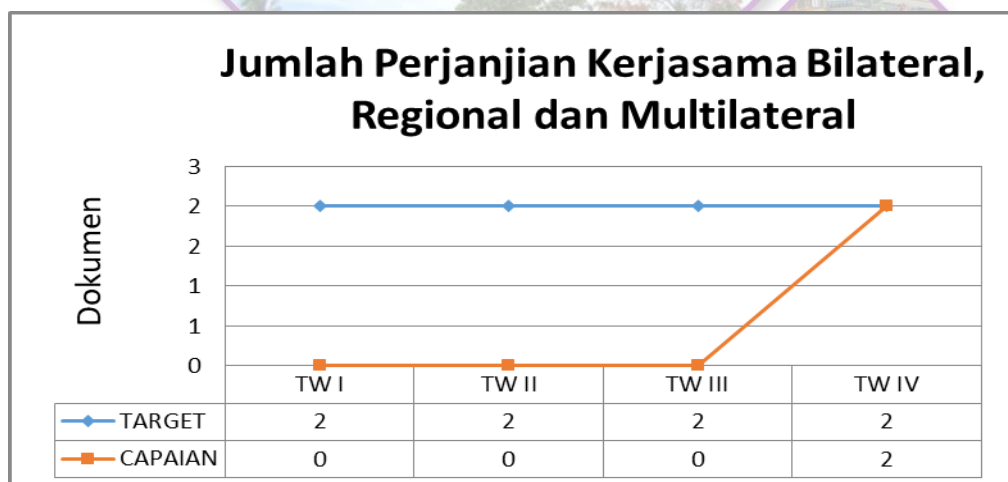
Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	KINERJA (%)
-----------	--------	--------	---------------------------------	----------------

KINERJA UTAMA				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 19	Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral	Dokumen	2	0	0	0	2	2	100

sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 2 (dua) Dokumen. Terlihat pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 2 (dua) dokumen sehingga prosentase pencapaian sebesar 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.3.19 Jumlah Perjanjian Kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral



Adapun Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral sebagai berikut:

- 1) *Instrument of Extension for The Memorandum of Understanding Between The Directorate General of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The Republic of Indonesia and The Maritime and Port Authority of Singapore Concerning Co-Operation on Human Resources Development of The Government Officers in The Maritime Field ("Training MoU");*
- 2) *Memorandum of Understanding Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia Concerning Transboundary Marine Pollution Preparedness and Response.*

20) Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama Nasional dan Internasional

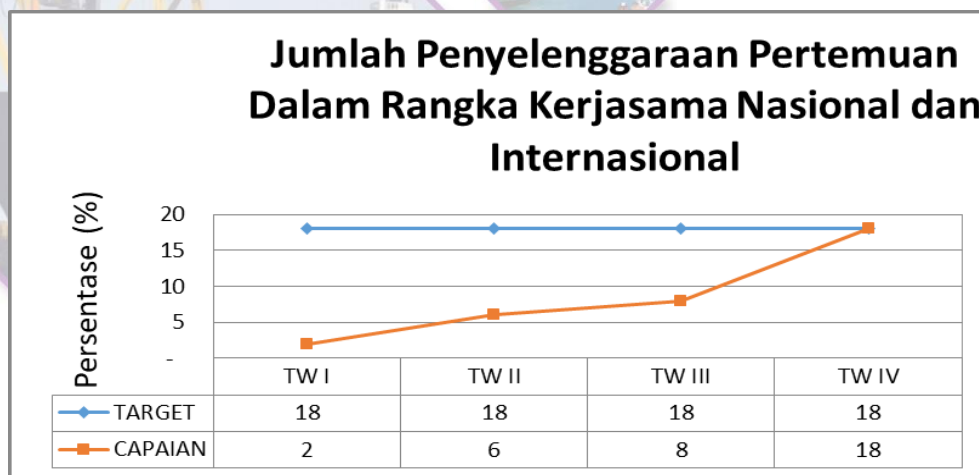
Tabel 3.3.25

Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama Nasional dan Internasional

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 20	Jumlah penyelenggaraan pertemuan dalam rangka kerjasama nasional dan internasional	Dokumen	18	2	6	8	18	18	100

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 18 (delapan belas) Kegiatan. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 2 (dua) Kegiatan, untuk Triwulan II realisasi sebesar 6 (enam) Kegiatan dan pada Triwulan III realisasi sebesar 8 (delapan) Kegiatan, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 18 (delapan belas) Kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.3.20 Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama Nasional dan Internasional



Adapun jumlah penyelenggaraan pertemuan dalam rangka kerjasama nasional dan internasional sebagai berikut:

1. Ferry Mishap Contingency Plan Meeting
2. Workshop IMO MEPC 72
3. Workshop IMO LEG 105
4. Workshop IMO MSC 99
5. Workshop IMO COUNCIL 120
6. First High Level Regional Meeting on MEPSEAS
7. Table Top Exercise Ferry Mishap Contingency Plan
8. DGST-MPA Workshop on IMDG Code
9. DGST-MPA Workshop on Port State Control
10. Training on VTS Refresher Operator
11. Workshop IMO MEPC 73
12. 3rd DGST-MPA Officer Dialogue
13. 12th DGST-MPA Training MoU Meeting

14. Workshop IMO Council 121
15. DGST-MPA Workshop on IMSAS
16. Workshop IMO MSC 100
17. IMO - A Hazid/Scoping Exercise
18. International Workshop on PSSA

SASARAN STRATEGIS (7)

Sasaran strategis **Terlaksananya pembinaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan penatausahaan** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

21) Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran

Tabel 3.3.26

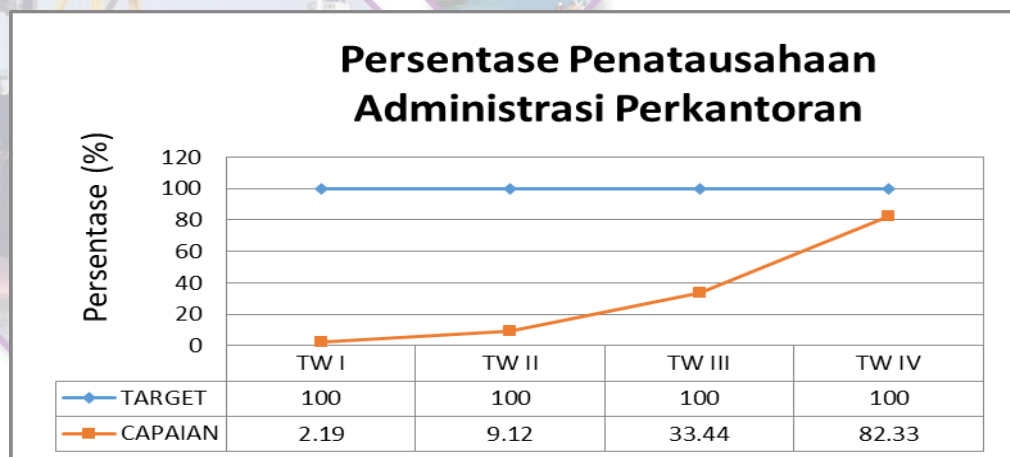
Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 21	Persentase penatausahaan administrasi perkantoran	%	100	2.19	9.12	33.44	82.33	82.33	82.33

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 100 % Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 2.19% (dua koma satu sembilan persen) Kegiatan, untuk Triwulan II realisasi sebesar 9.12% (Sembilan koma dua belas persen) Kegiatan dan pada Triwulan III realisasi sebesar 33.44% (tiga

puluh tiga koma empat puluh empat persen) Kegiatan, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 82.33% (delapan puluh dua koma tiga puluh tiga persen) Kegiatan sehingga prosentase pencapaian tahun 2018 sebesar 82.33% dan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena 1) Adanya pemotongan anggaran kegiatan yang akan dilelangkan sebesar 10% dari nilai Pagu melalui Unit Manajemen Proyek, 2) Pada kegiatan pelelangan, penyedia jasa menawarkan dengan harga rendah, 3) Adanya *force major*.

Grafik 3.3.21 Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran



22) Persentase Pelaksanaan Administrasi dan Operasional Kerumahtanggaan

Tabel 3.3.27

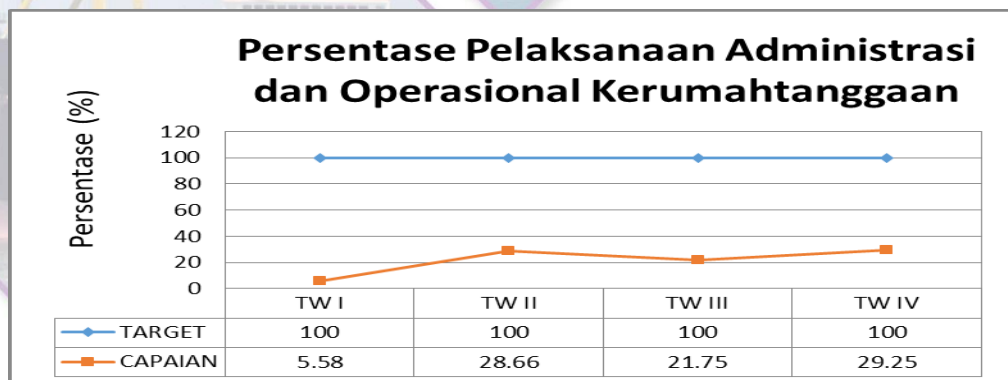
Persentase Pelaksanaan Administrasi dan Operasional Kerumahtanggaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 22	Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional kerumahtanggaan	%	100	5.58	34.24	55.99	85.24	85.24	85.24

sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 100 %, terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 5.58% (lima koma lima delapan

persen), untuk Triwulan II realisasi sebesar 34.24% (tiga puluh empat koma dua puluh empat persen) dan pada Triwulan III realisasi sebesar 55.99% (lima puluh lima koma Sembilan puluh sembilan persen), sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 85.24% (delapan puluh lima koma dua puluh empat persen) Kegiatan sehingga prosentase pencapaian tahun 2018 sebesar 85.24% dan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena adanya *force major*.

Grafik 3.3.22 Persentase Pelaksanaan Administrasi dan Operasional Kerumahtanggaan



23) Nilai BMN pada neraca Ditjen Perhubungan Laut

Tabel 3.3.28

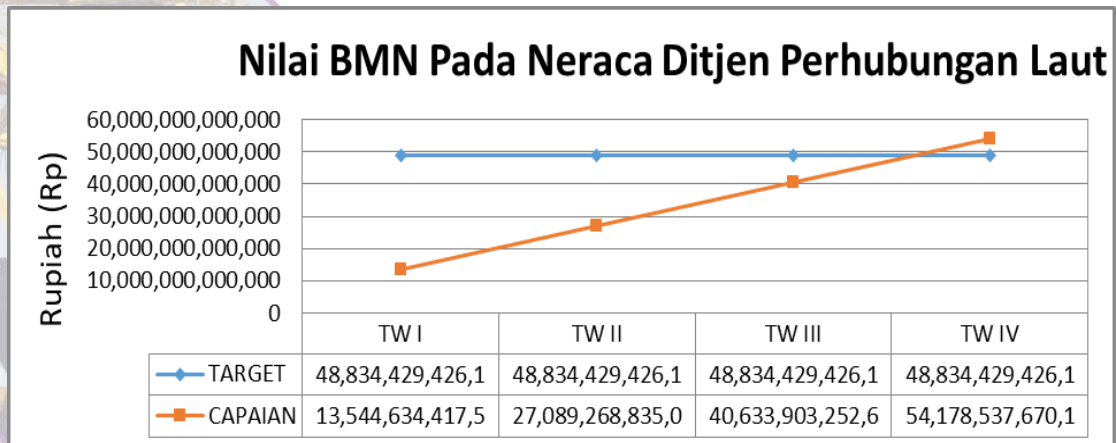
Nilai BMN pada Neraca Ditjen Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 23	Nilai BMN pada neraca Ditjen Perhubungan Laut	Rp.	48.834.429.426.125	13.544.634.417.538	27.089.268.835.077	40.633.903.252.615	54.178.537.670.153	54.178.537.670.153	110.9

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar Rp. 48.834.429.426.125,- pada bagian umum dan perlengkapan terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi

Rp. 13.544.634.417.538,- sampai dengan Triwulan II terdapat realisasi Rp. 27.089.268.835.077,- sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi Rp. 40.633.903.252.615,- dan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar Rp. 54.178.537.670.153,- prosentase pencapaian sebesar 110.9%

Grafik 3.3.23 Nilai BMN Pada Neraca Ditjen Perhubungan Laut



SASARAN STRATEGIS (8)

Sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Kehumasan Ditjen Hubla** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

24) Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat

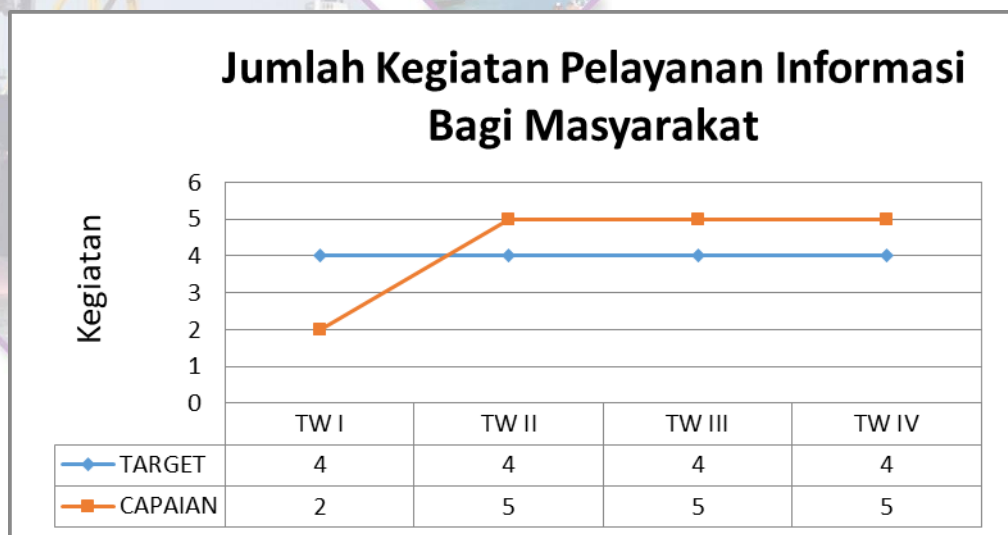
Tabel 3.3.29

Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 24	Jumlah kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat	Kegiatan	4	2	5	5	5	5	125

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 4 (empat) Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 2 (dua) Kegiatan, untuk Triwulan II realisasi sebesar 4 (empat) Kegiatan dan pada Triwulan III realisasi sebesar 5 (lima) Kegiatan, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 5 (lima) Kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 125% dan melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena adanya arahan pimpinan untuk meningkatkan kegiatan publikasi dan pelayan informasi kepada masyarakat.

Grafik 3.3.24 Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat



25) Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokoler

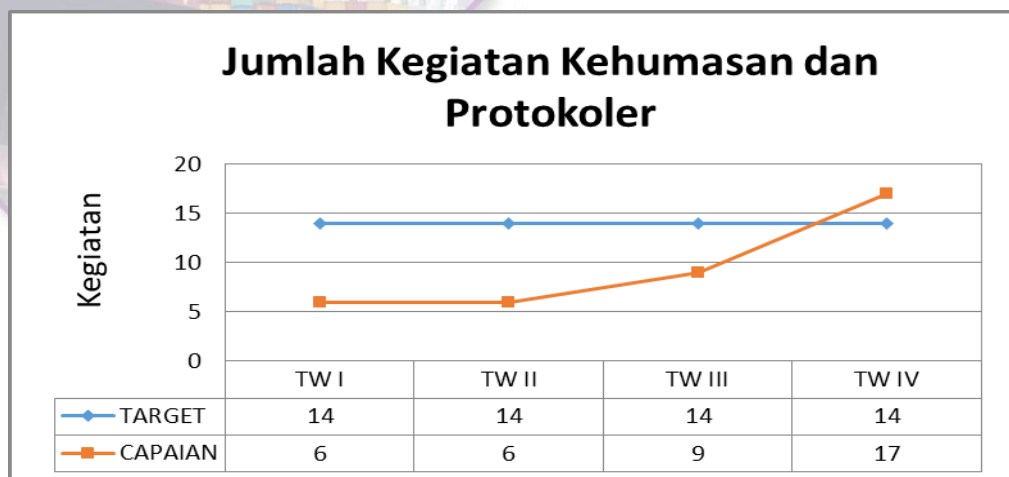
Tabel 3.3.30

Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokoler

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 25	Jumlah kegiatan kehumasan dan protokoler	Kegiatan	14	6	6	9	17	17	121

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 14 (empat belas) Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 6 (enam) Kegiatan, untuk Triwulan II realisasi sebesar 6 (enam) Kegiatan dan pada Triwulan III realisasi sebesar 9 (sembilan) Kegiatan, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 17 (tujuh belas) Kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 121% dan melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena meningkatnya permintaan peliputan kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat/Bagian serta terlaksananya kegiatan Jiwa Korsa yang baru tahun ini diselenggarakan.

Grafik 3.3.25 Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokoler



SASARAN STRATEGIS (9)

Sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Ditjen Hubla** terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

26) Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pemeliharaan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi

Tabel 3.3.31

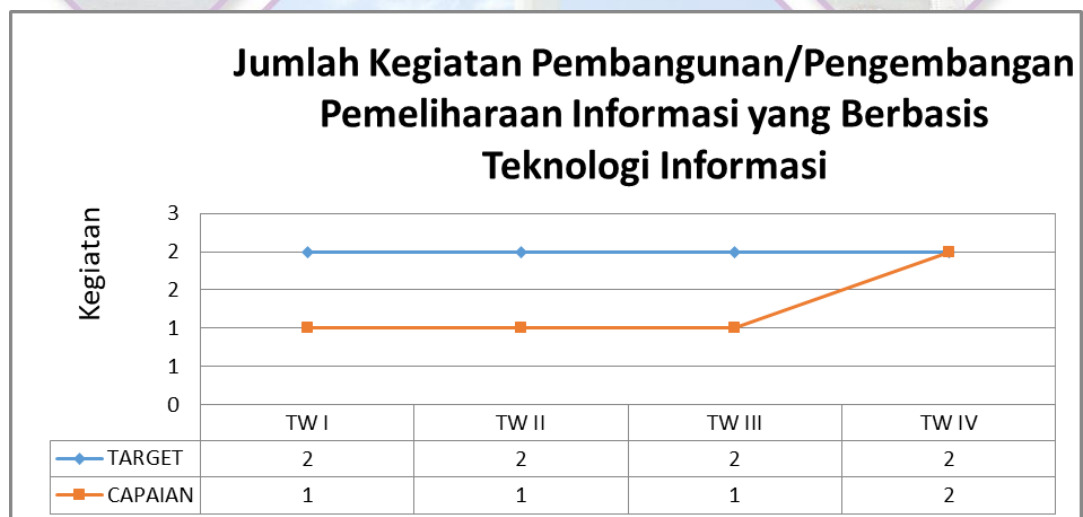
Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pemeliharaan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	KINERJA (%)
-----------	--------	--------	---------------------------------	----------------

KINERJA UTAMA				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 26	Jumlah kegiatan pembangunan/pengembangan Pemeliharaan informasi yang berbasis teknologi informasi (IT)	Kegiatan	2	1	1	1	2	2	100

sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 2 (dua) Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 1 (satu) Kegiatan, untuk Triwulan II realisasi sebesar 1 (satu) Kegiatan dan pada Triwulan III realisasi sebesar 1 (satu) Kegiatan, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 2 (dua) Kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%.

Grafik 3.3.26 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pemeliharaan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi



Sebanyak 2 (dua) sistem dengan prosentase pencapaian sebesar 200% dengan uraian sebagai berikut :

1. *Maintenance Portal* Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan;
2. *Updating* Kertas Kerja Monitoring Beserta *E-Monitoring* Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dilaksanakan secara berkala di bulan Maret.

SASARAN STRATEGIS (10)

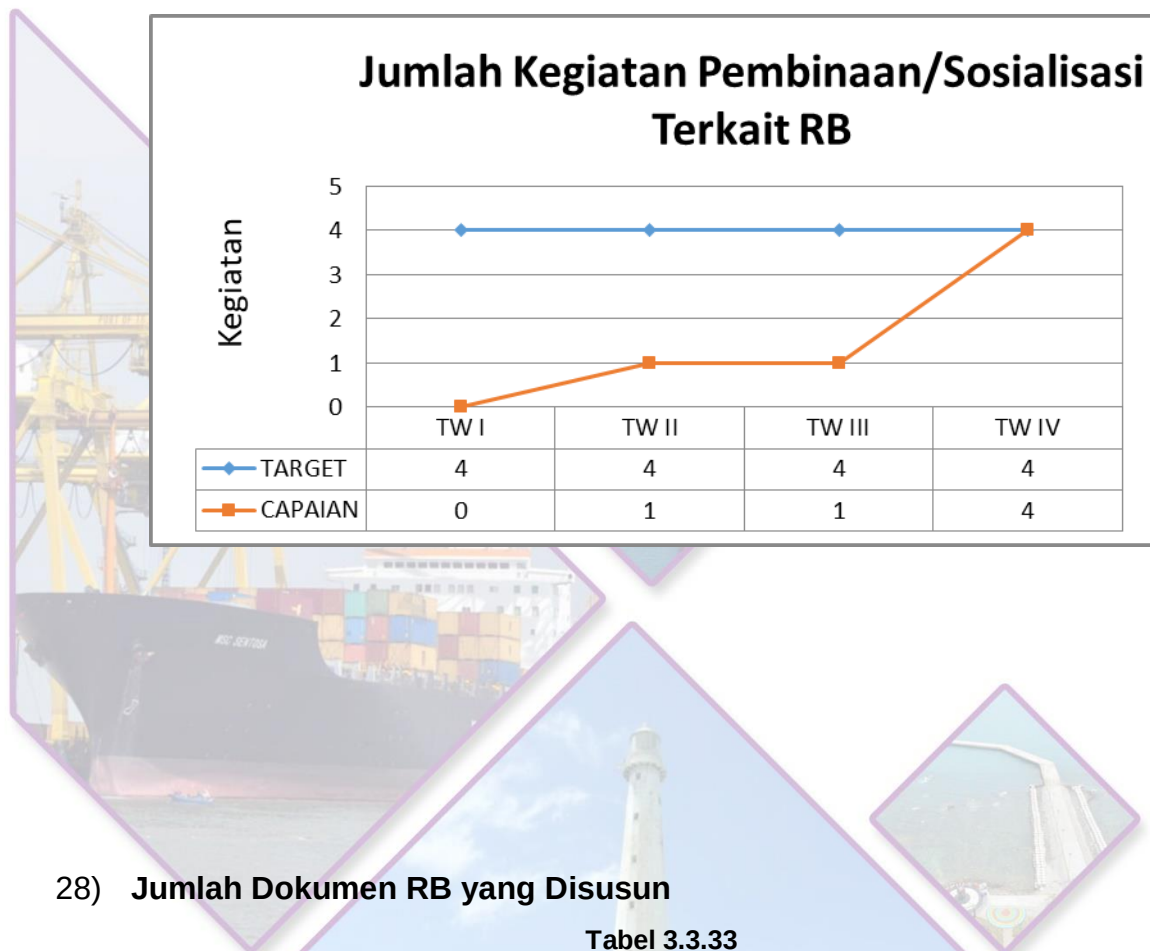
Sasaran strategis **Terlaksananya Fungsi Manajemen Organisasi dan Tata Laksana** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

27) Jumlah Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Terkait RB**Tabel 3.3.32****Jumlah Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Terkait RB**

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 27	Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi terkait RB	Kegiatan	4	0	1	1	4	4	100

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 4 (empat) Terlihat pada Triwulan belum terdapat realisasi Kegiatan, untuk Triwulan II dan III realisasi sebesar 1 (satu) Kegiatan, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 4 (tiga) Kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 100% dan sudah sesuai target yang telah ditentukan

Grafik 3.3.27 Jumlah Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Terkait RB



28) Jumlah Dokumen RB yang Disusun

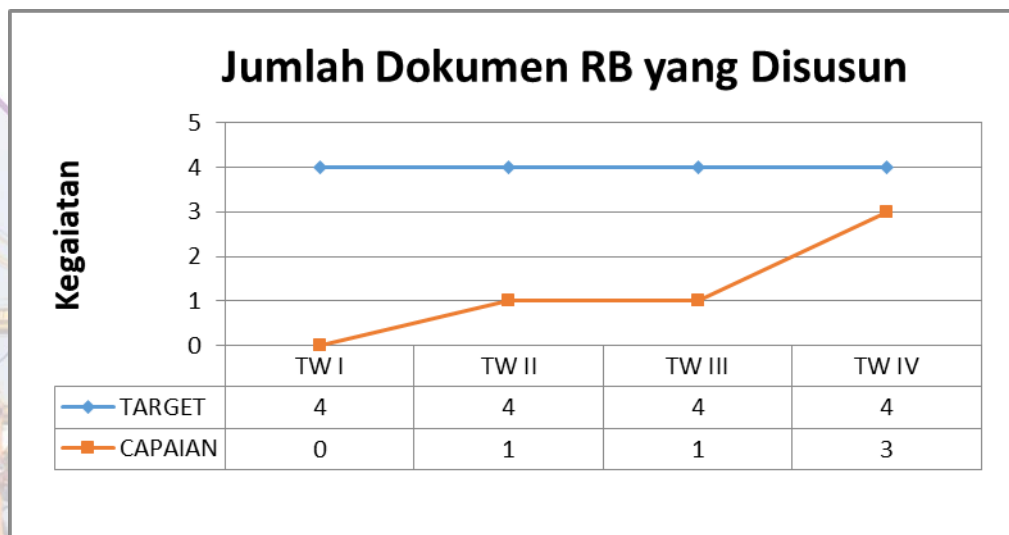
Tabel 3.3.33

Jumlah Dokumen RB yang Disusun

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 28	Jumlah dokumen RB yang disusun	Kegiatan	4	0	1	1	4	4	100

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 4 (empat) Terlihat pada Triwulan I belum terdapat realisasi, untuk Triwulan II dan triwulan III realisasi sebesar 1 (satu), sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 4 (empat) Kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 100% sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Grafik 3.3.28 Jumlah Dokumen RB yang Disusun



SASARAN STRATEGIS (11)

Sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Ditjen Hubla** terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

29) Jumlah SDM Setditjen yang Mengikuti Diklat/Bimtek

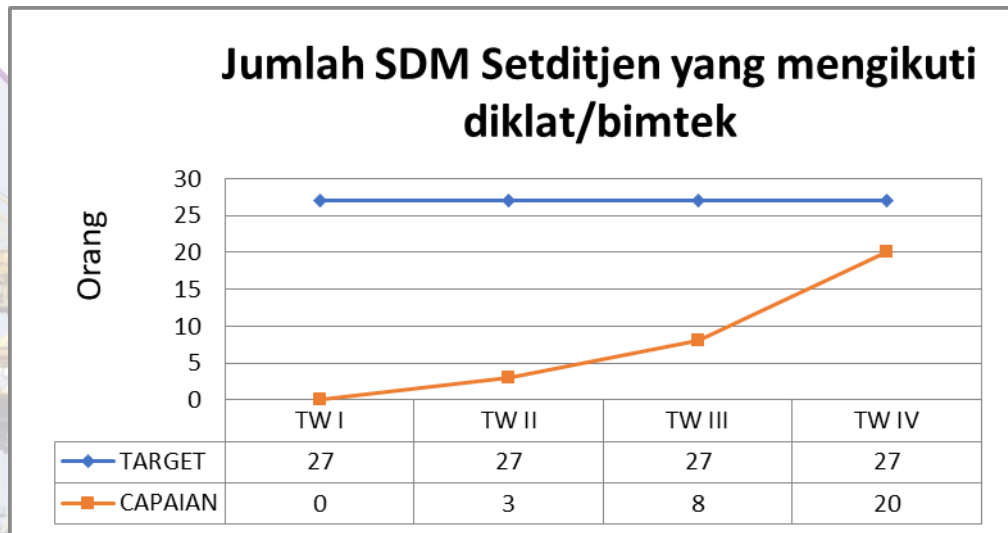
Tabel 3.3.34

Jumlah SDM Setditjen yang Mengikuti Diklat/Bimtek

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 29	Jumlah SDM Setditjen yang mengikuti diklat/bimtek	Orang	27	0	3	8	20	20	74,07

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 27 (dua puluh tujuh) orang dimana terlihat pada Triwulan I belum terdapat realisasi, untuk Triwulan II realisasi sebesar 3 (tiga) orang dan pada Triwulan III realisasi sebesar 8 (delapan) pegawai, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 20 (dua puluh) Kegiatan sehingga prosentase pencapaian sebesar 74,07%.

Grafik 3.3.29 Jumlah SDM Setditjen yang Mengikuti Diklat/Bimtek

**SASARAN STRATEGIS (12)**

Sasaran strategis **Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Setditjen Hubla** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

30) Jumlah Sistem dan Informasi di Lingkungan Setditjen Hubla

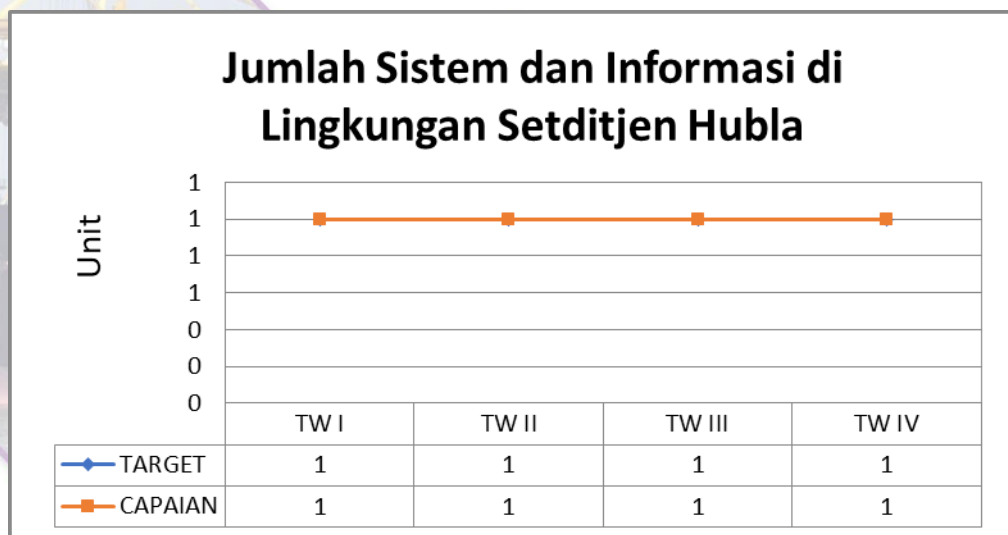
Tabel 3.3.35

Jumlah Sistem dan Informasi di Lingkungan Setditjen Hubla

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 30	Jumlah sistem dan informasi di lingkungan Setditjen Hubla	Unit	1	1	1	1	1	1	100

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 1 (satu) unit Terlihat pada Triwulan I sudah realisasi 1 (satu) unit, untuk Triwulan II realisasi sebesar 1 (satu) unit dan pada Triwulan III realisasi sebesar 1 (satu), sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 1 (satu) unit sehingga prosentase pencapaian sebesar 100% dan telah sesuai target.

Grafik 3.3.30 Jumlah Sistem dan Informasi di Lingkungan Setditjen Hubla



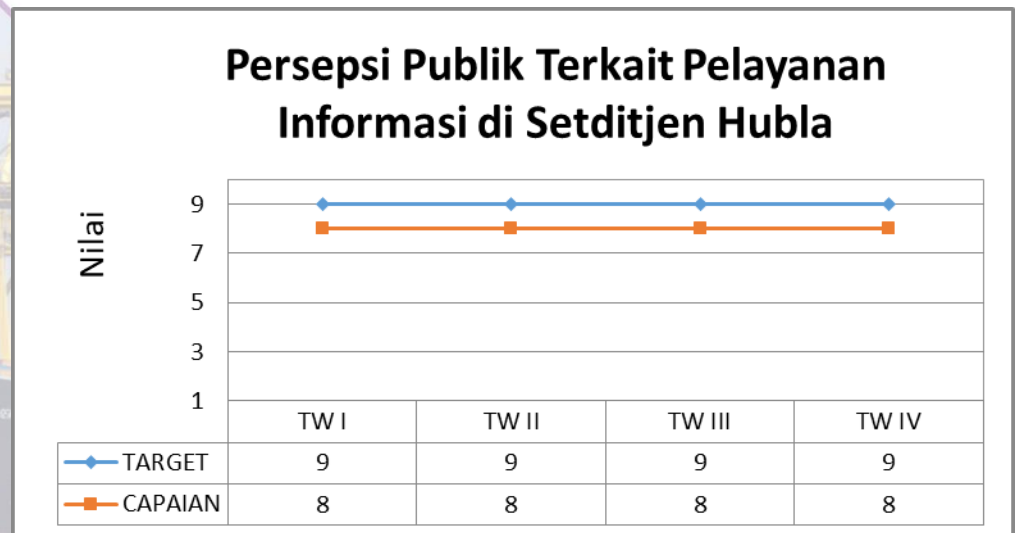
31) Persepsi Publik Terkait Pelayanan Informasi di Setditjen Hubla

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 31	Persepsi publik terkait pelayanan informasi di Setditjen Hubla (1-10)	Unit	9	8	8	8	8	8	88,8

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 9 (sembilan) Nilai. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 8 (delapan) Nilai, untuk Triwulan II realisasi sebesar 1 (satu) unit dan pada Triwulan III realisasi sebesar 8 (delapan) unit, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 8 (delapan) unit prosentase pencapaian sebesar 88,8% dan

belum sesuai dengan apa yang telah ditargetkan karena terkendala karena sulitnya koordinasi antar unit.

Grafik 3.3.31 Persepsi Publik Terkait Pelayanan Informasi di Setditjen Hubla



SASARAN STRATEGIS (13)

Sasaran strategis **Jumlah dokumen SAKIP yang disusun** terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

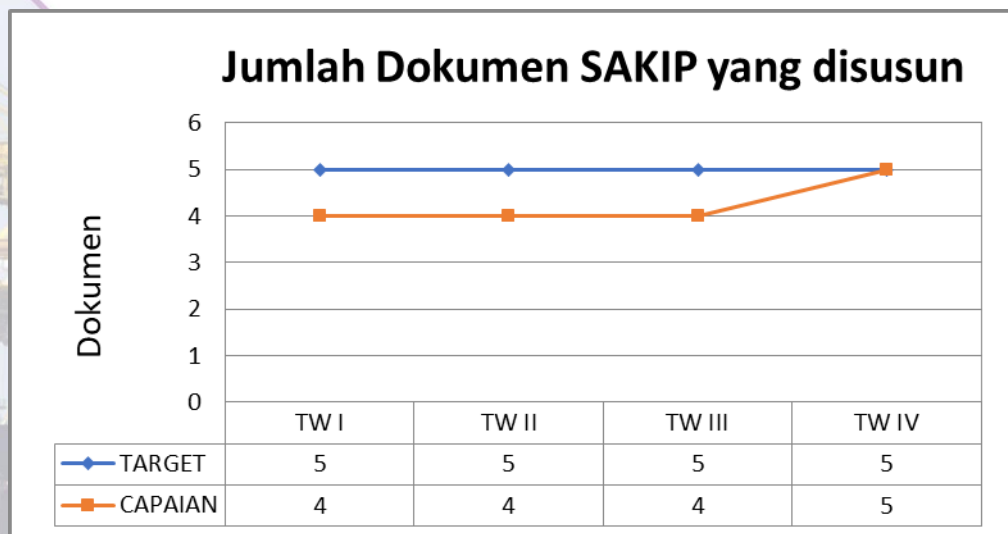
32) Jumlah Dokumen SAKIP yang Disusun

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 32	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5	4	4	4	5	5	100

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 5 (lima) Dokumen. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi sebesar 4 (empat) Dokumen dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 5 (Lima) Dokumen

sehingga prosentase pencapaian sebesar 100% dan telah sesuai dengan apa yang telah ditargetkan

Grafik 3.3.32 Jumlah Dokumen SAKIP yang Disusun



Adapun Dokumen SAKIP yang telah disusun yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018
4. Rencana Aksi (Renaksi) Atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

SASARAN STRATEGIS (14)

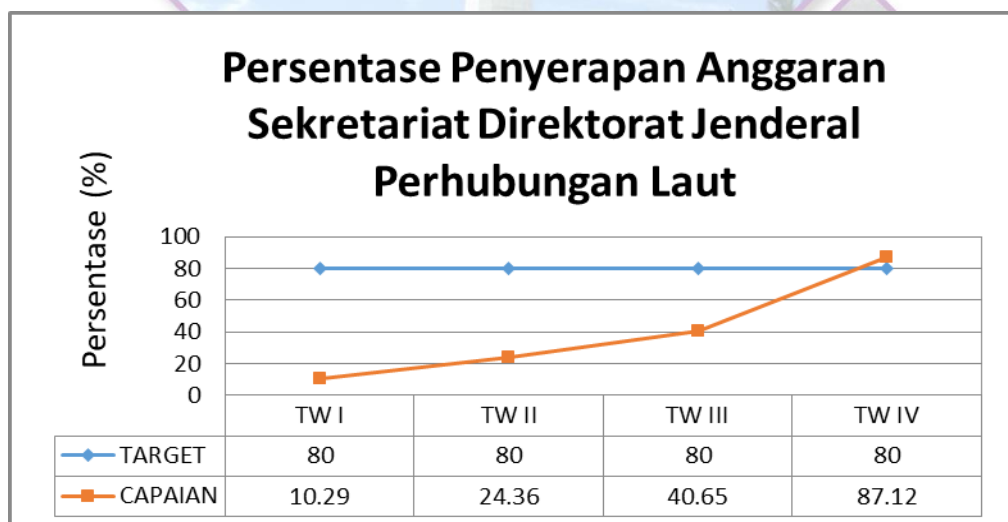
Sasaran strategis **Terkelolanya anggaran Setditjen Hubla secara Optimal** terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

33) Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen Hubla

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 33	Persentase penyerapan anggaran Setditjen Hubla	%	80	10,29	24,36	40,65	87,12	87.12	108

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 100%. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 10,29%, untuk Triwulan II realisasi sebesar 24,36% dan pada Triwulan III realisasi sebesar 40,65% sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 87,12% prosentase pencapaian sebesar 108% dan melebihi yang telah ditargetkan

Grafik 3.3.33 Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen Hubla

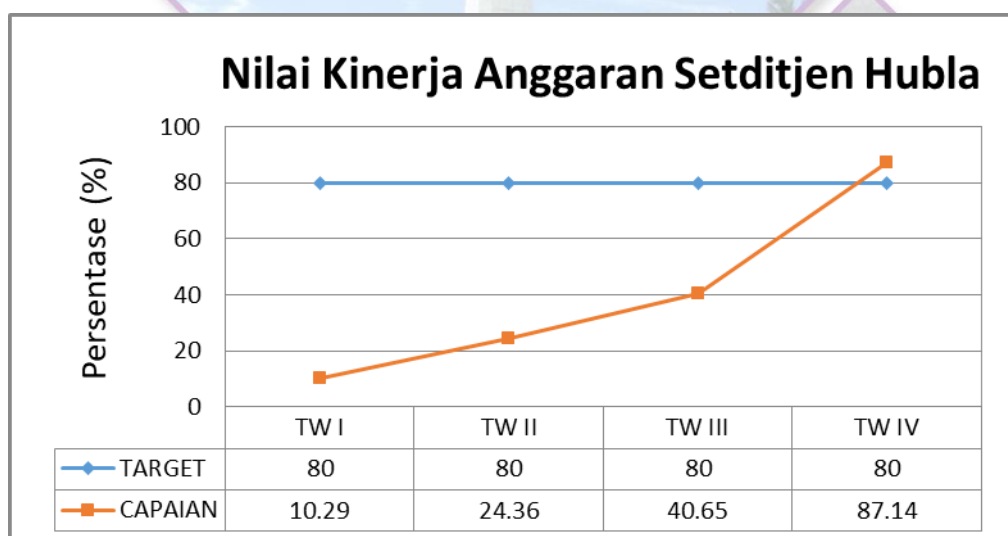


34) Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Hubla

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 34	Nilai kinerja anggaran Setditjen Hubla	%	80	10,29	24,36	40,65	87,14	87,14	108,92

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar 80%. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 10,29%, untuk Triwulan II realisasi sebesar 24,36% dan pada Triwulan III realisasi sebesar 40,65%, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 87,14% sehingga prosentase pencapaian sebesar 108,92% dan melebihi target yang telah ditetapkan.

3.3.34. Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Hubla

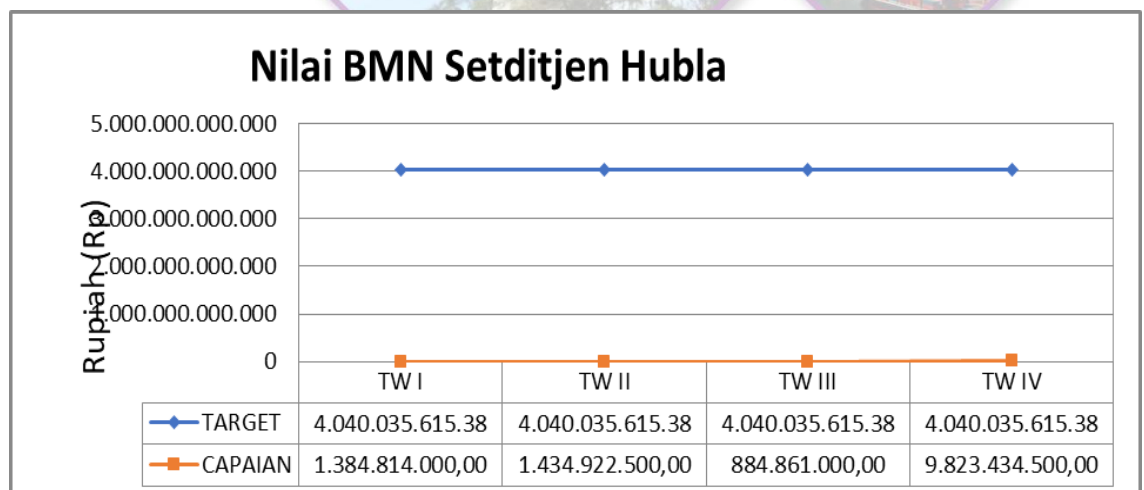


35) Nilai BMN Setditjen Hubla

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 35	Nilai BMN Setditjen Hubla	Rp.	4.040.035.615.382	1.384.814.000	1.434.922.500	884.861.000	6.118.837.000	9.823.434.500	96.73

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar Rp. 4.040.035.615.382. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar Rp. 1.384.814.000, untuk Triwulan II realisasi sebesar Rp. 1.434.922.500 dan pada Triwulan III realisasi sebesar Rp. 884.861.000, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar Rp. 6.118.837.000 sehingga prosentase pencapaian sebesar 96.73% dan belum sesuai dengan apa yang telah ditargetkan karena 1) Adanya pemotongan anggaran kegiatan yang akan dilelangkan sebesar 10% dari nilai Pagu melalui Unit Manajemen Proyek, 2) Pada kegiatan pelelangan, penyedia jasa menawarkan dengan harga rendah.

3.3.35. Nilai BMN Setditjen Hubla

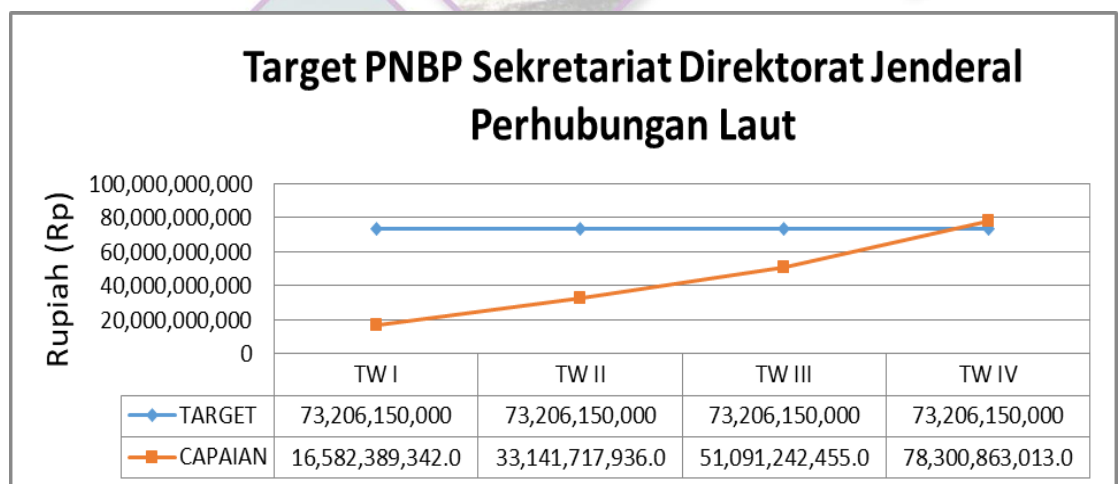


36) Target PNBP Setditjen Hubla

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2018					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKU. 36	Target PNBP Setditjen Hubla	Rp	73.206.150.000	5.424.423.569	4.263.977.887	6.481.490.868	9.106.925.719	78.300.863.013	106,96

Sesuai dengan target tahun 2018 sebesar Rp. 73.206.150.000. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar Rp. 16.582.389.342, untuk Triwulan II realisasi sebesar Rp. 33.141.717.936,- dan pada Triwulan III realisasi sebesar Rp. 51.091.242.455, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar Rp. 78.300.863.013 sehingga prosentase pencapaian sebesar 106,96% dan telah sesuai dengan apa yang telah ditargetkan karena terdapat pelunasan piutang lancar maupun piutang macet PNBP Jasa Navigasi Pelayaran dan pada bulan Oktober 2018 terdapat pelunasan kekurangan pembayaran PNBP Jasa Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia

3.3.37. Target PNBP Setditjen Hubla





III.4 ANALISA EFISIENSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA

TABEL 3.6.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
SS.1	Terselenggara administrasi Ditjen Hubla	IKU.1 Prosentase peningkatan jumlah pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang bersertifikat (Bag. Kepegawaian)	%	80	98,96	Keahlian dan Keterampilan Pelaut Terkait Basic Safety Training	1.782.991.000	1.653.758.000	7,25
						Pemutakhiran Kompetensi Keahlian Pelaut	803,552,000	710,646,000	11,56
						Peningkatan Kompetensi Sdm Bendahara Penerima Dan Pengeluaran	1,105,260,000	854,257,500	22,71

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
		IKU.2 Prosentase kehandalan sistem informasi Ditjen Hubla (Bag. Ortala)	%	80	80	Polling penilaian kehandalan sistem informasi ditjen hubla	?	?	
		IKU.3 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen Hubla (skala likert 1-5) (Bag.Ortala)	Nilai	4	3,82	Nilai persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di ditjen hubla	?	?	
		IKU.4 Tingkat Kualitas Akuntabilitas Ditjen Hubla (Bag. Perencanaan)	%	82,55	0				
		IKU.5 Prosentase penyerapan anggaran Ditjen Hubla (Bag. Keuangan)	%	80	71,45				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
SS.2	Terlaksananya perencanaan, pemograman, penganggaran, monev dan pentarifan di Ditjen Hubla	IKU.6 Jumlah dokumen dan laporan yang disusun terkait SAKIP dan dokumen lainnya (Bag.Perencanaan)	Dokumen	5	5				
		IKU.7 Jumlah pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi terkait SAKIP dan Dokumen lainnya (Bag.Perencanaan)	Kegiatan	50	37				
		IKU.8 Jumlah Studi dan Kajian yang disusun (Bag.Perencanaan)	Dokumen	2	2				
SS.3	Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara Ditjen Hubla yang akuntabel	IKU.9 Jumlah dokumen dan laporan keuangan di lingkungan Ditjen Hubla yang disusun (Bag.Perencanaan)	Dokumen	336					
		IKU.10 Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi di bidang keuangan (Bag.Kuangan)	Kegiatan	3	2				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
		IKU.11 Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan (Bag.Keuangan)	Kegiatan	10	7				
SS.4	Terlaksananya fungsi kepegawaian Ditjen Hubla	IKU.12 Jumlah penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi (Bag.Keuangan)	Kegiatan	8	2				
		IKU.13 Jumlah penerbitan SK mutasi/kenaikan pangkat/jabatan fungsional (Bag. Kepegawaian)	SK	4142	7.282	Inventarisasi dan Validasi Data Dalam Rangka Evaluasi Mutasi Pindah Tugas Pegawai	278,560,000	278.000.000	0,20
						Penetapan Angka Kredit PKP Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pkp Ke Upt	241,920,000	241,140,000	0,32

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
						Ditjen Hubla			
						Inventarisasi Dan Validasi Data Dalam Rangka Kenaikan Pangkat Di Lingkungan Ditjen Hubla	140,700,000	140.000.000	0,32
		IKU.14 Prosentase jumlah kasus disiplin pegawai yang dapat ditangani sampai selesai (Bag.Kepegawaian)	%	50	72,26	Pemeriksaan Dan Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	1,297,943,000	1.222.078.950	5,84
SS.5	Meningkatnya pemenuhan dan efektivitas pelaksanaan regulasi di	IKU.15 Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan (Bag. Hukum&KSLN)	Dokumen	10	10	Rancangan PP : Rancangan PM : Rancangan SK Dirjen :	87.230.100 749.388.100 661.161.000	0 715.582.400 119.245.675	87.230.100 33.805.60 541.915.32

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
	bidang transportasi laut	IKU.16 Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan (Bag. Hukum&KSLN)	Dokumen	8	9	Sosialisasi APKKN Sosialisasi P4GN Sosialisasi PM Sosialisasi PP	2.083.443.000 2.006.305.000 1.716.044.000 1.633.984.000	1.399.392.000 1.568.210.840 1.589.339.000 1.171.087.000	584.051.000 438.094.160 126.705.000 462.897.000
		IKU.17 Jumlah penyelesaian perkara (Bag. Hukum&KSLN)	Dokumen	5	8	Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara	1.316.328.000	986.647.400	329.680.500
SS.6	Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional	IKU.18 Jumlah perjanjian kerjasama dalam negeri (Bag. Hukum&KSLN)	Dokumen	6	7	Penyusunan a Naskah Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian	328.524.000	294.494.900	34.029.100
		IKU.19 Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral (Bag. Hukum&KSLN)	Dokumen	2	2	Penyelenggaraan Pertemuan Bilateral Bidang Maritim	753.000.000	542.960.000	210.040.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
		IKU.20 Jumlah penyelenggaraan pertemuan dalam rangka kerjasama nasional dan internasional (Bag.Hukum&KSLN)				Mengadiri Sidang Internasional, Regional, dan Bilateral	5.661.115.000	0	5.661.115.000
						Menghadiri Pertemuan dan Sidang Internasional di Indonesia	600.000.000	416.060.000	183.940.000
			Kegiatan	18	18	Penyelenggaraan Sidang Multilateral, Regional, dan Bilateral	1.503.000.000	1.317.414.000	295.585.000
						Penyelenggaraan Program Kerjasama Teknis Bidang Maritim	1.500.000.000	1.468.363.000	31.537.00
SS.7	Terlaksananya	IKU. 21 Persentase penatausahaan	%	100	82.33	1. Program Kerja dan Rencana			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
	pembinaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan penatausahaan	administrasi perkantoran (Bag. Umum & Perlengkapan)				Kegiatan pada Bag. Umum dan Perlengkapan 2. Rapat Kerja (Raker) Ditjen Hubla 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Perkantoran 4. Validasi Pencatatan Barang Persediaan dan Barang Inventaris Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Hubla 5. Validasi Pencatatan Persediaan Barang Cetakan Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Hubla 6. Pemutakhiran Data Kartu Inventaris Barang Asset BMN Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Hubla	63.400.385.000	52.195.719.336	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
						7. Persiapan Pelaporan BMN, Barang Persediaan dan Catatan atas Laporan Keuangan Ke Kantor Pusat Ditjen Hubla 8. Pembinaan Petugas Ketatausahaan 9. Pembinaan Disiplin dan Pembentukan Jiwa Korsa 10. Penyuluhan/ Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran 11. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 12. Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 2 13. Pengadaan Alat Pengolah Data 14. Pengadaan Meubelair 15. Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
						16. Pengadaan Obat-obatan Kantor Pusat 17. Pengadaan Pakaian Kerja 18. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 19. Operator Pelayanan Terpadu 20. Pengadaan Barang Cetakan 21. Belanja Sewa			
		IKU. 22 Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional kerumahtanggaan (Bag. Umum & Perlengkapan)	%	100	85.24	1. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Hubla 2. Penyuluhan dan Pembinaan Keprotokolan dan MC di Lingkungan Ditjen Hubla 3. Pertemuan /Jamuan Delegasi/Misi/Tamu 4. Perawatan Gedung Kantor 5. Perbaikan Peralatan Kantor	13.805.697.000	11.767.877.425	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
						6. Biaya Rumah Tangga Kantor 7. Lampu dan Perlengkapannya 8. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 9. Perawatan Kendaraan Operasional Roda Dua			
		IKU. 23 Nilai BMN pada neraca Ditjen Perhubungan Laut (Bag. Umum & Perlengkapan)	Rp.	48.834.429.426.125	9.823.434.500	1. Bimtek BMN Wilayah Barat (Batam) 2. Bimtek BMN Wilayah Barat (Jogja) 3. Bimtek BMN Wilayah Tengah (Malang) 4. Bimtek BMN Wilayah Timur (Makassar) 5. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Semester I 6. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Semester II	10.155.343.000	9.823.434.500	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
						7. Penyusunan Rencana Kerja Barang Milik Negara (RKBMN)			
SS.8	Meningkatnya Kinerja Kehumasan Ditjen Hubla	IKU.24 Jumlah kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat (Bag. Ortala)	Kegiatan	4	5				
		IKU.25 Jumlah kegiatan kehumasan dan protokoler (Bag. Ortala)	Kegiatan	14	17	1. Evaluasi ringkasan dan analisa berita (setiap bulan) 2. Dokumentasi foto dan video (setiap bulan) 3. Pembuatan siaran pers (setiap bulan) 4. Peliputa			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
						n dan pemantauan opini publik pelayanan angkutan laut (setiap bulan) 5. Liputan khusus pembangunan sarpras di lingkungan Ditjen Hubla (setiap bulan) 6. Pembuatan Profil Ditjen Hubla 7. Bimtek			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
						8. Media Sosial 9. Liputan Penyele nggaraa n dan Publikas i Sidang Internas ional di Indonesi a 10. Penyele nggaraa n pamera n/visuali sasi 11. Kampan ye Kesela matan Pelayar an 12. Press Tour Ditjen Hubla 13. Seminar			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
						Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Hubla 13. Bimbingan Teknis Kehumasan 14. Penyusunan booklet, spanduk dan banner 15. Pembinaan disiplin dan pembentukan jiwa korsa 16. Media Relations 17. Penyusun			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
						an Buku Pintar			
SS.9	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Ditjen Hubla	IKU.26 Jumlah kegiatan pembangunan/pengembangan Pemeliharaan informasi yang berbasis teknologi informasi (IT) (Bag. Ortala)	Kegiatan	2	2	1. Monitoring sistem informasi Ditjen Hubla 2. Workshop Pengelolaan TIK			
SS.10	Terlaksananya Fungsi Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	IKU.27 Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi terkait RB (Bag. Ortala)	Kegiatan	4	4	1. Bimtek Penyusunan SPMP 2. Bimtek Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat 3. Workshop peningkatan Pelayanan Publik Bali 4. Workshop peningkatan Pelayanan Publik Ambon			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
						5. Workshop peningkatan Pelayanan Publik Palembang			
		IKU.28 Jumlah dokumen RB yang disusun (Bag. Ortala)	Kegiatan	1	1	Dokumen SPMP			
SS.11	Tersedianya SDM Setditjen Hubla yang Kompeten dan Profesional	IKU.29 Jumlah SDM Setditjen yang mengikuti diklat/bimtek (Bag. Kepegawaian)	Orang	27	20				
SS.12	Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Setditjen Hubla	IKU.30 Jumlah sistem dan informasi di lingkungan Setditjen Hubla (Bag. Ortala)	Unit	1	1	Maintenance portal dan aplikasi Mobile Ditjen Hubla	0	0	0
		IKU.31 Persepsi publik terkait pelayanan informasi di Setditjen Hubla (1-10) (Bag. Ortala)	Nilai	9	8,38	Nilai Persepsi publik terkait pelayanan informasi di			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
						Setditjen Hubla			
SS.13	Terwujudnya <i>a good governance</i> dan <i>clean government</i> di Setditjen Hubla	IKU.32 Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Bag. Perencanaan)	Dokumen	5	5				
SS.14	Terkelolanya anggaran Setditjen Hubla secara Optimal	IKU.33 Presentase penyerapan anggaran Setditjen Hubla (Bag. Keuangan)	%	80	10,29				
		IKU.34 Nilai kinerja anggaran Setditjen Hubla (Bag. Keuangan)	%	80	40,65				
		IKU.35 Nilai BMN Setditjen Hubla (Bag. Umum & Perlengkapan)	Rp	4.040.035.615.382	9.823.434.500				
		IKU.36 Target PNBPN Setditjen Hubla (Bag. Keuangan)	Rp	73.206.150.000	5.424.423.569				

3.1 REALISASI ANGGARAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2018 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

**Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018**

NO	URAIAN	PAGU AWAL (Rp. 000)	PAGU AKHIR (Rp. 000)	REALISASI (Rp. 000)
1	Belanja Pegawai	1.680.513.996	1.867.135.835	1.772.637.301
2	Belanja Barang	5.288.361.913	5.202.343.578	4.464.598.476
3	Belanja Modal	4.631.611.046	7.348.147.550	5.336.848.322
	TOTAL PAGU	11.600.486.955	14.417.626.963	
	TOTAL REALISASI			11.574.084.099
	TOTAL SISA DANA			4.020.037.657



BAB IV

PENUTUP

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2018

4.1 KESIMPULAN

Pencapaian keberhasilan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2018 ini, antara lain peningkatan kualitas SDM di sektor transportasi laut, peningkatan jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), peningkatan jumlah dokumen untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan teknis, peningkatan jumlah rancangan peraturan yang ditetapkan, serta peningkatan pelayanan informasi bagi masyarakat. Namun demikian masih terdapat beberapa ketidakberhasilan yang akan diupayakan untuk diperbaiki pada tahun berikutnya.

Penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2018 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Kementerian Perhubungan secara umum dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya. Selain itu, sinergi antara dukungan kemampuan SDM dengan layanan informasi yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2018 ini.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018 baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain :

a. Pengembangan Informasi Berbasis Teknologi Informasi (IT)

Adanya kebijakan internal Kementerian Perhubungan yang mengatur bahwa pengembangan segala informasi berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan harus melalui koordinasi Sekretariat Jenderal Perhubungan Laut cq. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom) mengakibatkan menurunnya pencapaian jumlah indikator ini pada capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tetapi kedepan diharapkan dengan adanya kebijakan baru ini, akan membuat sinergi pengembangan informasi berbasis teknologi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

menjadi lebih baik karena berada di bawah satu komando Kementerian Perhubungan.

b. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Pada tahun 2018 Kementerian Perhubungan telah mengajukan kebutuhan Tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) termasuk di dalamnya kebutuhan tenaga teknis sebanyak 3.295 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) formasi kepada Kementerian PAN dan RB, akan tetapi dengan adanya kebijakan Presiden RI tentang Moratorium Rekrutmen CPNS pada tahun 2015 s.d. 2019, maka pada akhir tahun 2018, Kementerian PAN dan RB hanya mengalokasikan formasi CPNS untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dari Kementerian Keuangan sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) orang. Sehingga, kebutuhan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, utamanya untuk kebutuhan pegawai di Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum dapat dipenuhi.

4.2 Langkah ke depan

Keberhasilan kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak terlepas dari jajaran seluruh unit kerja yang ada. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam upaya mensinergikan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang akan dikoordinasi oleh unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
2. Pengajuan kembali tenaga teknis ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk alokasi kebutuhan tenaga teknis sector transportasi laut.
3. Mengupayakan koordinasi lebih intensif di lingkungan petugas Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka mendorong pencapaian nilai Barang Milik Negara (BMN) agar dapat memenuhi target yang diharapkan.